



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

TAHUN 2025

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



Kata Pengantar

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada masa transisi periode pergantian Kepala Daerah di tahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Dari RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Bantul, 26 Februari 2026

Kepala,



DIAN MUTIARA SRI RAHMAWATI, SH., MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196911121996032003

Ikhtisar Eksekutif

Pada tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dari RPJMD dan Rencana Strategis periode Tahun 2021-2026 menuju periode Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja di lakukan dengan mengukur 2 (dua) perjanjian kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja 2025 (Murni) dan 4 (empat) Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Perubahan 2025, sebagai berikut:

1. Capaian Tujuan

Indikator tujuan pada tahun 2025 hanya tercantum pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dan Dokumen Renstra Tahun 2025-2029.

Capaian tujuan Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Tata Kelola Arsip dengan indikator sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) target tahun 2025 sebesar 82.70 (penentuan target dengan rumus lama) realisasi sebesar 8,41 (realisasi menggunakan rumus baru). Realisasi tidak dapat dibandingkan dengan target karena ada perubahan komponen perhitungan.
- Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintahan Daerah target tahun 2025 sebesar 86.40 terealisasi 85.27 atau tercapai 98.70%.

2. Sasaran Kinerja

a. Sasaran Kinerja pada Perjanjian Kinerja 2025 (Murni):

1) Sasaran Meningkatnya Jumlah Kunjungan Pemustaka

- Diukur dengan indikator Persentase Pemustaka yang Berkunjung ke Perpustakaan (meta indikator: jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan / jumlah penduduk x 100%). Jumlah penduduk yang digunakan pada laporan ini adalah jumlah penduduk semester I.

Target tahun 2025 sebesar 183% terealisasi 204.47% dengan prosentase capaian sebesar 111.73%.

Diukur dengan indikator Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan (meta indikator: Nilai Survei Kepuasan Masyarakat/SKM).

Target tahun 2025 sebesar 90.07 terealisasi 90.19 dengan prosentase capaian sebesar 100.13%

2) Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Standar

- Diukur dengan indikator Cakupan OPD yang Mempunyai Tata Kelola Kearsipan dengan Baik (meta indikator: jumlah PD yang telah melaksanakan tata kelola kearsipan dengan nilai baik / jumlah PD x 100%). Target tahun 2025 sebesar 100% terealisasi 97.78% dengan prosentase capaian 97.78%.

3) Sasaran Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

- Diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat /IPLM (meta indikator mengalami perubahan komponen perhitungan, rumus semula Jumlah unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) dibagi aspek masyarakat (AM) kali 100. Sedangkan rumus baru adalah ; $IPLM = ((0.30 \times \text{Dimensi Kepatuhan}) + (0.70 \times \text{Dimensi Kinerja})) \times 100$.

Target tahun 2025 sebesar 82,70 (penetapan target dengan rumus lama) terealisasi 8,41 (realisasi menggunakan rumus baru).

IPLM merupakan indikator kinerja tambahan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP dari Kementrian PAN dan RB

b. Sasaran Kinerja pada Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 :

1) Sasaran Meningkatnya Budaya Gemar Membaca

Diukur dengan indikator Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (meta indikator mengalami perubahan komponen perhitungan, rumus semula $TGM = (0.3TFM + 0.3TDM + 0.3 TJB + 0.05FAI + 0.05DAI)$. Sedangkan rumus baru menjadi $TKM = ((0.15 \times \text{Pra Membaca}) + (0.50 \times \text{Saat Membaca}) + (0.35 \times \text{Pasca Membaca})) \times 100$.

Target tahun 2025 sebesar 81,14 (rumus lama) terealisasi 55,93 (rumus baru). Karena ada perubahan koponen perhitungan TKM maka realisasi tidak dapat dibandingkan.

2) Sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Arsip

Diukur dengan indikator Indeks Pengawasan Arsip Internal (meta indikator: sesuai ketentuan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2029 tentang Pengawasan Kearsipan),

Target tahun 2025 sebesar 80,83 realisasi 84,19 dengan prosentase capaian sebesar 104,15%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang diwujudkan dalam strategi di tahun yang akan datang, sebagai berikut:

Urusan Perpustakaan

1. Meningkatkan pembinaan pengelolaan perpustakaan agar semakin banyak perpustakaan yang dapat diakses oleh masyarakat;
2. Meningkatkan pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
3. Meningkatkan kerjasama dengan pihak eksternal (seperti lembaga pemerintah, institusi pendidikan, komunitas literasi, penerbit, perusahaan, dll) untuk terlibat dalam upaya meningkatkan layanan dan pengembangan pengelolaan perpustakaan;
4. Menambah program kegiatan yang mendukung peningkatan minat baca serta ketrampilan literasi;
5. Menambah inovasi layanan perpustakaan dan mengoptimalkan layanan perpustakaan secara online.

Urusan Kearsipan

1. Melakukan sosialisasi dan implementasi peraturan dan pedoman tentang Pengelolaan Kearsipan.
2. Melakukan pendampingan dan pembinaan tentang kearsipan kepada Arsiparis/ Petugas Arsip di Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan, BUMD, Ormas dan Orsospol;
3. Mengupayakan penambahan regulasi/pedoman tentang pengelolaan arsip;
4. Mengupayakan dan sosialisasi penggunaan aplikasi Srikandi di Perangkat Daerah;
5. Membuka peluang Perangkat Daerah untuk berkonsultasi kepada LKD (Lembaga Kearsipan Daerah).

vii

B.1.2 Sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Arsip	32
B.2.1. Sasaran Meningkatnya Jumlah Kunjungan Pemustaka.....	34
B.2.2. Sasaran Meningkatnya Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	38
B.2.3. Sasaran Meningkatnya Budaya Gemar Membaca	44
C. Akuntabilitas Anggaran.....	55
D. Efisiensi Sumber Daya	57
E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender.....	59
F. Lintas Sektor	60
Bab V Penutup.....	61
LAMPIRAN	63

Daftar Tabel

Tebel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	18
Tebel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	19
Tebel III. 3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	20
Tebel III. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Secara Nasional Tahun 2025	21
Tebel III. 5 Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan	23
Tebel III. 6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	25
Tebel III. 7 Ekstraksi Aspek Penilaian pada Formulir Audit Kearsipan Internal	26
Tebel III. 8 Data Hasil Penilaian Kearsipan OPD	27
Tebel III. 9 Jumlah Arsiparis se-Kabupaten Bantul	28
Tebel III. 10 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Arsip	
Tebel III. 11 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	35
Tebel III. 12 Persentase Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan	36
Tebel III. 13 Jumlah Pengunjung Layanan Perpustakaan	36
Tebel III. 14 Nilai SKM terhadap Pelayanan Perpustakaan	37
Tebel III. 15 Tabel Komponen Pengukuran IPLM	39
Tebel III. 16 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	43
Tebel III. 17 Hasil Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Bantul Tahun 2022-2025	43
Tebel III. 18 Tabel Komponen Pengukuran TKM	45
Tebel III. 19 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran (sesuai PK Perubahan) Tahun 2025	47
Tebel III. 20 Hasil Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Kabupaten Bantul	47
Tebel III. 21 Hasil Akreditasi Perpustakaan (Reguler) Tahun 2025	50
Tebel III. 22 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2025	55
Tebel III. 23 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	56
Tebel III. 24 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	58

Daftar Gambar

Gambar I. 1 Bagan Organisasi PD	2
Gambar I. 2 <i>Cascading</i> Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025	5
Gambar II. 1 <i>Screenshoot</i> Aplikasi E-SAKIP	17
Gambar III. 1 Foto Kegiatan Urusan Kearsipan.....	34
Gambar III. 3 Foto Kegiatan Urusan Perpustakaan.....	54

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul ini memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka mengembangkan otonomi daerah. Hal ini ditunjang oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan. Dalam peranannya pada urusan perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan harus siap untuk ikut serta dalam mencerdaskan bangsa melalui bahan bacaan atau literature yang terseleksi dan uptodate, memberikan layanan baca secara optimal kepada masyarakat baik di lokasi perpustakaan maupun melalui perpustakaan keliling. Hal ini perlu dilakukan karena minat baca masyarakat Bantul masih rendah. Oleh karena itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diharapkan mampu meningkatkan minat baca masyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya arsip (Gerakan Tertib Arsip) di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Adapun dasar hukum terbentuknya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

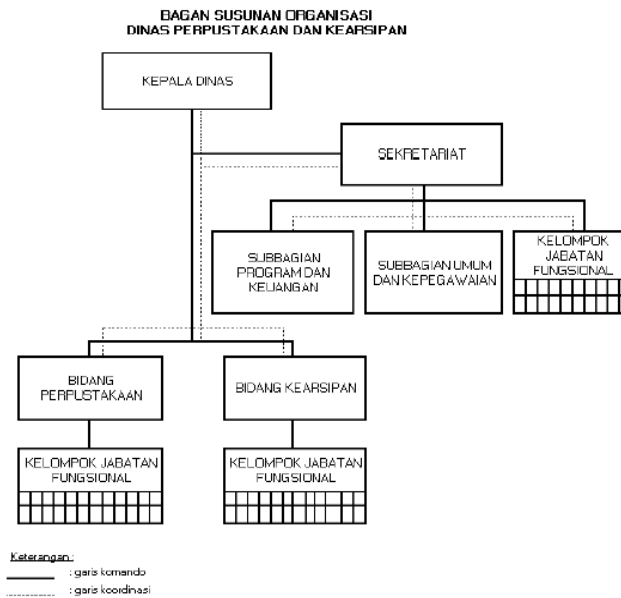
B. Pembentukan Perangkat Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagai tugas pokoknya adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan;
2. pelaksanaan kebijakan bidang perpustakaan dan kearsipan ;
3. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang perpustakaan dan kearsipan;
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan dan kearsipan;
5. pelaksanaan administrasi pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan;
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi OPD digambarkan sebagai berikut



BUPATI BANTUL,
tta
ABDUL HALIM MUSLIH

Gambar I. 1 Bagan Organisasi PD

D. Keragaman SDM

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki SDM yang beragam. Dukungan sumber daya manusia pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang Ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki-laki	Perempuan
			S2	S1	D3	SMA/D2		S2	S1	D3	SMA/D2		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1		1			1	1				1	
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	3		3			1	1					1
	2. Pengawas	2			2		1		1				1
	3. Pelaksana	16		7	5	4	5			2	3	2	3
	4. Jabatan Fungsional	32		11	21		20	1	3	16		8	12
	Jumlah	54		22	28	4	28	3	4	18	3	11	17

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan didominasi oleh jenjang pendidikan diploma (D3) sebanyak 18 orang (64,28%) kemudian jenjang pendidikan S1 sebanyak 3 orang (10,71%), SLTA sebanyak 3 orang (10,71%) dan jenjang pendidikan S2 sebanyak 3 orang (10,71%). Komposisi

pegawai perempuan lebih banyak dari pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 24 orang, terdiri dari 11 orang pejabat pelaksana dan 12 orang pejabat fungsional berdasarkan Daftar Analisis Jabatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul.

E. Isu Strategis

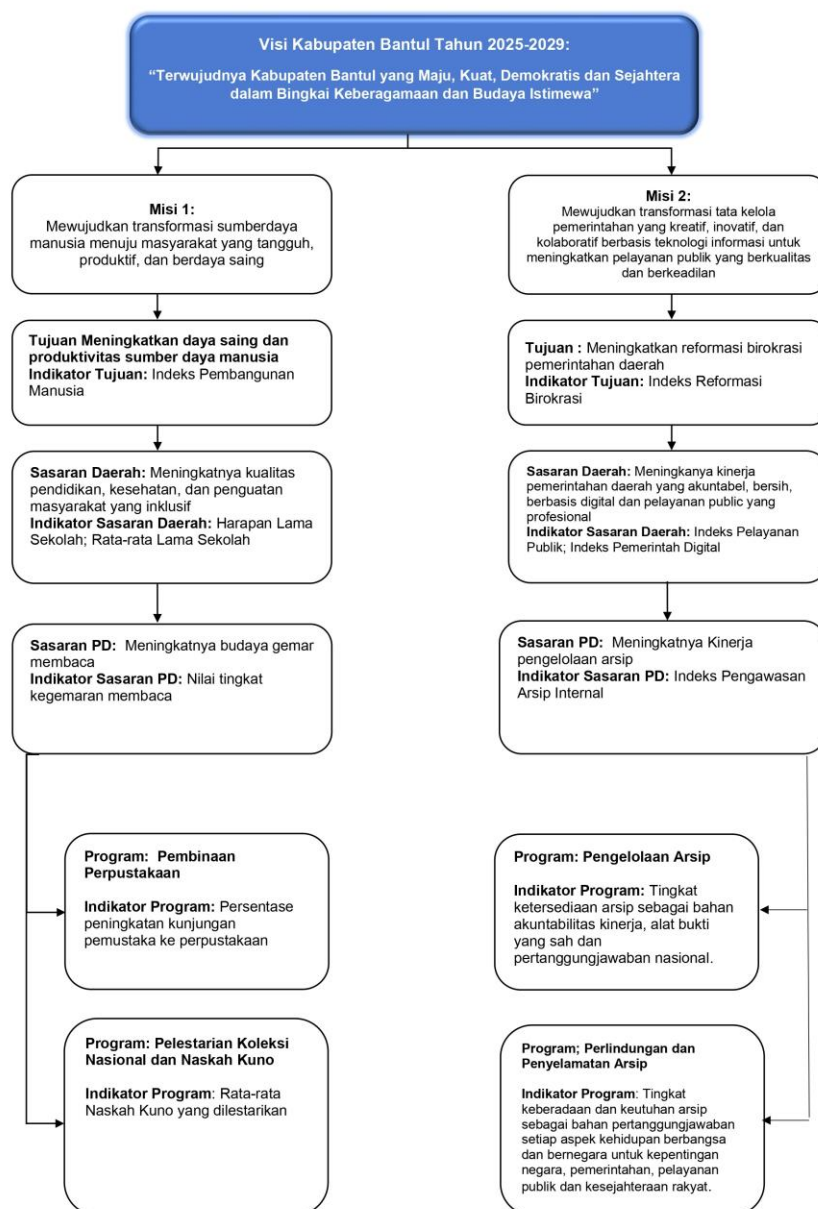
Isu strategis adalah kondisi yang penting diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya signifikan bagi daerah. Isu ini menjadi fokus utama dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah. Dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam menentukan isu strategis, maka dapat diidentifikasi isu strategis Kabupaten Bantul 2025-2029 untuk urusan perpustakaan dan kearsipan.

Adapun Isu strategis yang ditangani Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada periode tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan pemerataan akses layanan perpustakaan yang inklusif dan sesuai Standar Nasional Perpustakaan yang menjangkau semua lapisan masyarakat (responsive gender);
2. Penyediaan bahan bacaan yang bermutu dan beragam baik tercetak maupun digital;
3. Pemerataan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam layanan perpustakaan;
4. Pengembangan kompetensi dan jumlah tenaga perpustakaan/pustakawan;
5. Peningkatan dukungan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan literasi;
6. Identifikasi keberadaan naskah kuno;
7. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip;
8. Peningkatan kualitas dan kinerja SDM Kearsipan;
9. Kurangnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap regulasi dalam pengelolaan arsip;
10. Belum ada regulasi tentang penerapan Aplikasi Srikandi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi misi tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/0470.C/Ev..SAKIP/2025 tanggal 30 April 2025, perihal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut:

Rekomendasi :

1. Meninjau kembali target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun yang akan datang dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya;
2. Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah dengan upaya optimalisasi fungsi monev didukung rencana aksi secara nyata dalam rangka pencapaian kinerja

Tindaklanjut Rekomendasi:

1. Telah dilakukan peninjauan kembali target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul pada tahun 2025. IKU yang telah disesuaikan ini tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
2. Telah dilakukan monitoring rencana aksi pada tahun 2025.

Bukti dukung:

Terlampir

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsian Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021-2026. Rencana strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”

Dari 5 (lima) misi Kabupaten Bantul, Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul mendukung misi yang ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) adalah sebagai berikut:

Misi ke-1: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.

Misi ke-2: Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu:

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul mendukung misi Kabupaten Bantul yang ke-1 (satu) dan ke-2(dua) adalah sebagai berikut:

Misi ke-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang Tangguh, produktif dan berdaya saing.

Misi ke-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai cascade kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul adalah sasaran daerah yang didukung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul yaitu:

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel
2. Terwujudnya pemerataan dan daya saing Pendidikan

Sedangkan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Bantul adalah:

1. Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama): Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik
2. Meningkatnya jumlah kunjungan pemustaka dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama):
 - a. Persentase Pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan

b. Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan

Tabel II. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar	Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik
2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan	Meningkatnya jumlah kunjungan pemustaka	1) Persentase Pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan 2) Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan

Sumber data: RPJMD Tahun 2021-2026

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029, tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Bantul, yaitu:

1. Meningkatnya literasi masyarakat dan tata kelola arsip dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintahan Daerah.

Sedangkan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, yaitu:

1. Meningkatnya budaya gemar membaca dengan indikator Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat
2. Meningkatnya kinerja pengelolaan arsip dengan indikator Indeks Pengawasan Arsip Internal

Tabel II.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2025-2029

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing	Meningkatkan literasi masyarakat dan tata kelola arsip		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
		Meningkatnya budaya gemar membaca	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat
2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan literasi masyarakat dan tata kelola arsip		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah
		Meningkatnya kinerja pengelolaan arsip	Indeks Pengawasan Kearsipan Internal

Sumber data : RPJMD Tahun 2025-2029

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II. 3 Strategi dan Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Renstra Periode 2021-2026

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif , efisien, bersih, dan akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima			
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar	1. Meningkatkan pengelolaan arsip Daerah Kabupaten Bantul	1. Pengelolaan arsip dinamis Daerah Kabupaten Bantul sesuai NSPK 2. Pengelolaan arsip statis Daerah Kabupaten Bantul sesuai NSPK 3. Pemanfaatan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Daerah dalam pengelolaan arsip
		2. Meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip	1. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai NSPK 2. Dilakukan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			3. Dilakukan penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung , dibubarkan 4. Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media Kabupaten 5. Dilakukan pencarian arsip statis Kabupaten yang dinyatakan hilang

Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur

Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan	Meningkatnya jumlah kunjungan pemustaka	Meningkatkan pembinaan Perpustakaan	1. Pengelolaan Perpustakaan sesuai Standar Nasional 2. Membudayakan gemar membaca di masyarakat
--	---	-------------------------------------	--

Sumber data: Renstra Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pembinaan Perpustakaan
3. Program Pengelolaan Arsip
4. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II. 4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya penyelenggaraan Kearsipan sesuai Standar	Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik
2	Meningkatnya jumlah kunjungan pemustaka	Persentase pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan perpustakaan
3	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat *

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Keterangan : * Indek Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan indikator kinerja tambahan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN RB

Tabel II.5 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan literasi masyarakat dan tata kelola arsip (tujuan)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
2	Meningkatnya budaya gemar membaca (sasaran)	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat
3	Meningkatkan literasi masyarakat dan tata kelola arsip (tujuan)	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintahan Daerah
4	Meningkatnya kinerja pengelolaan arsip (sasaran)	Indeks Pengawasan Arsip Internal

Sumber : Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 – 2026.

Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 mengacu kepada Renstra Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut:

Tabel II. 6 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya jumlah kunjungan Pemustaka	Persentase Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan	persen	183	I	183
					II	183
					III	183
					IV	183*)
		Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	angka	90,07	I	90,07
					II	90,07
					III	90,07
					IV	90,07*)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Target
2.	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar	Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*)
3.	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat**)	angka	82,70	I	82,70
					II	82,70
					III	82,70
					IV	82,70*)

Keterangan :

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

**) Indikator kinerja tambahan sebagai hasil tindak lanjut Evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN&RB

No	Nama Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.548.207.453,00
2.	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 1.756.142.184,00
3.	Program Pengelolaan Arsip	Rp 357.863.544,00
4.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp 5.324.800,00
Jumlah		Rp 8.667.537.981,00

Pada tahun 2025, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena adanya pergantian/mutasi pejabat dan telah ditetapkannya Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Tahun 2025-2029 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel II. 7 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Target
1.	Tujuan: Meningkatkan literasi masyarakat dan tata kelola arsip	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	82,70	I	-
					II	-
					III	-
					IV	82,70*)
		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintahan daerah	Nilai	86,40	I	-
					II	-
					III	-
					IV	86,40*)
2.	Sasaran: Meningkatnya budaya gemar membaca	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	81,14	I	-
					II	-
					III	-
					IV	81,14*)
3.	Sasaran: Meningkatnya kinerja pengelolaan arsip	Indek Pengawasan Arsip Internal	Indeks	80,83	I	-
					II	-
					III	-
					IV	80,83

Keterangan :

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

No	Nama Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.784.920.426,00
2.	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 1.945.701.788,00
3.	Program Pengelolaan Arsip	Rp 457.592.244,00
4.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp 5.324.800,00
	Jumlah	Rp 8.193.539.258,00

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II. 8 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar	2 (dua) program
2.	Meningkatnya jumlah kunjungan Pemustaka	1 (satu) program
3	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat*)	

Sumber : Renstra Tahun 2021-2026

*) Indikator kinerja tambahan sebagai hasil tindak lanjut Evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN&RB

Tabel II.9 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya budaya gemar membaca	1 (satu) program
2.	Meningkatnya kinerja pengelolaan arsip	2 (dua) program

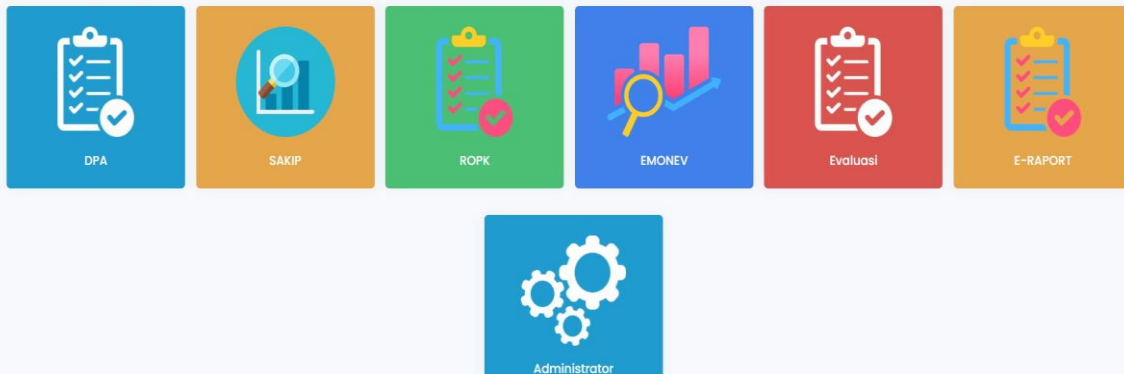
Sumber : Renstra tahun 2025-2029

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi **<https://esakip.kab-bantul.id/>** yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

User adminorganisasi berhasil login

E-SAKIP E-ROPK E-Raport Kabupaten Bantul Tahun 2023 - DEV/TEST



Gambar II. 1 Screenshot Aplikasi E-SAKIP

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pengukuran target kinerja dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Murni)

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Sasaran: Meningkatnya jumlah kunjungan Pemustaka	Persentase Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan	182,31	183	204.47	111,73	35	584.2
		Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	90,06	90,07	90,19	100,13	87	103,66
2	Sasaran: Meningkatnya penyelenggaraa n kearsipan sesuai standar	Cakupan OPD yang Mempunyai Tata Kelola Kearsipan dengan Baik	100	100	97,78	97,78	95	102,92
3	Sasaran: Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)*	Indeks pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	82,60	82,70	8,41**	-	-	-

Sumber : Esakip ROPK Tahun 2025

Keterangan : * Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan indikator kinerja tambahan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN RB. Indikator ini tercantum dalam PK Murni Tahun 2025

** Target IPLM ditetapkan menggunakan rumus lama sedangkan realisasi menggunakan rumus baru sesuai Edaran Perpusnas RI No. B.11351/2/APB.00.02/XII.2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Perubahan Perhitungan IPLM dan TKM sehingga realisasi tidak dapat dibandingkan

Tabel III. 3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap 2029 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Tujuan: Meningkatkan literasi masyarakat dan tata kelola arsip	Indeks pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	82,60	82,70*	8,41**	-	-	-
2		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintahan Daerah	86,36	86,40	85,27	98,70	86,60	98,51
3	Sasaran: Meningkatnya budaya gemar membaca	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	80,89	81,14*	55,93**	-	-	-
4	Sasaran: Meningkatnya kinerja pengelolaan arsip	Indeks Pengawasan Arsip Internal	80,82	80,83	84,19	104,15	80,87	104,10

Sumber : Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Periode 2025-2029

Keterangan:

* Target menggunakan komponen perhitungan/rumus lama (Renstra Dispusip Tahun 2025-2029)

** Realisasi IPLM dan TKM tidak dapat dibandingkan karena dihitung menggunakan rumus baru sesuai Surat Edaran Perpustnas RI No.B.11351/2/APB.00.02/XII.2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Perubahan Perhitungan IPLM dan TKM

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian indikator kinerja utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 berdasarkan Renstra PD Tahun 2021-2026, disimpulkan bahwa indikator sasaran ber kriteria Sangat Tinggi yaitu Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik dengan realisasi 97,78 atau tercapai 97,78%. Persentase Pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan dengan realisasi 204.47% atau tercapai 111.73%. Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan tercapai 90,19 atau tercapai 100.13%. Sedangkan untuk indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) terealisasi pada angka 8,41. Realisasi indikator IPLM ini mengalami perubahan komponen perhitungan/rumus sehingga tidak dapat dibandingkan.

Sedangkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian indikator kinerja utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 berdasarkan Renstra PD Tahun 2025-2029, disimpulkan bahwa indikator kinerja ber kriteria Sangat Tinggi yaitu Indeks Hasil

Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintahan Daerah dengan realisasi 85,27 atau 98,70% dan Indek Pengawasan Arsip Internal dengan realisasi 84,19 tercapai 104,15%. Sedangkan indikator kinerja Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dengan realisasi 8,41 dan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TKM) dengan realisasi 55,93. Untuk indikator kinerja IPLM dan TKM ini target masih menggunakan rumus lama sedangkan realisasi telah menggunakan rumus baru sehingga tidak dapat dibandingkan.

Adapun perbandingan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul yang dapat diperbandingkan dengan kinerja Pemerintahan Daerah Provinsi DIY hanya untuk kinerja “Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)” dan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TKM/TGM). Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Kabupaten Bantul dan Provinsi DIY Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	2025	
		Realisasi Provinsi DIY	Realisasi Kab. Bantul
1	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	48,05	8,41
2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	55,44	55,93

Sumber: Publikasi Hasil IPLM dan TKM 2025 Perpunas RI

Dari tabel III.3 dapat diketahui bahwa Indek Pembangunan Literasi Masyarakat di Tingkat Provinsi DIY diperoleh hasil 48,05 dan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TKM) diperoleh hasil 55,44. Sedangkan untuk Indek Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Bantul diperoleh hasil 8,41 dan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat diperoleh hasil 55,93. Hasil perolehan nilai IPLM Kabupaten Bantul lebih rendah dari perolehan di Tingkat Provinsi DIY karena dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat antara lain:

- 1) Ada perubahan rumus (komponen perhitungan) IPLM;
- 2) Waktu pendataan pendek;
- 3) Sampel yang dibutuhkan tidak terpenuhi maksimal;
- 4) Kurangnya pemahaman responden terhadap pertanyaan survei;

- 5) Perpustakaan di wilayah Kabupaten Bantul banyak yang belum memiliki petugas perpustakaan sehingga petugas perpustakaan dirangkap oleh guru atau tenaga administrasi sekolah;
- 6) Koleksi bacaan di perpustakaan yang ada di Kabupaten Bantul masih kurang terutama dari segi judul dan kurangnya variasi judul buku elektronik pada aplikasi SIBI (aplikasi E-book gratis);
- 7) Jenis perpustakaan khusus di wilayah Kabupaten Bantul belum teridentifikasi;
- 8) Masih kurangnya kegiatan-kegiatan yang membangkitkan minat baca masyarakat;
- 9) Keterbatasan akses Masyarakat terhadap layanan perpustakaan dan bahan bacaan.

Sedangkan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TKM) Kabupaten Bantul lebih tinggi dibandingkan hasil dari Provinsi DIY karena dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong antara lain:

- 1) Keberadaan Gedung Layanan Perpustakaan Umum Daerah dengan berbagai fasilitas layanannya baik secara online maupun onsite;
- 2) Adanya dana DAK Non Fisik untuk menambah kegiatan yang meningkatkan minat baca;
- 3) Adanya kerjasama dengan pihak eksternal (Pemangku Kepentingan, Lembaga Pemerintah, Institusi Pendidikan, dll) dalam kegiatan literasi;
- 4) Keberadaan Perpustakaan Desa/Kalurahan dan Komunitas serta Perpustakaan Sekolah di wilayah Kabupaten Bantul;

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

B.1. Tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tujuan Perangkat Daerah pada Renstra Tahun 2021-2026 merupakan sasaran Daerah sehingga tidak tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Murni) sedangkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 telah ditetapkan tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dimana indikator tujuan tersebut menjadi Indikator Kinerja Perangkat Daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki 1 (satu) tujuan dengan 2 (dua) indikator. Tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Meningkatkan literasi dan masyarakat dan tata kelola arsip, dengan indikator:

- Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
- Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintahan Daerah

Adapun rencana dan realisasi capaian tujuan disajikan pada tabel berikut:

Tabel III. 5 Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap 2029 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Tujuan: Meningkatkan literasi masyarakat dan tata kelola arsip	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	82,60	82,70	8,41*	-	-	-
		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintahan Daerah	86,36	86,40	85,27	98,70	86,60	98,51

Sumber : Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Periode 2025-2029

*Realisasi IPLM tidak dapat dibandingkan karena ada perubahan komponen perhitungan (rumus) sesuai Surat Edaran Perpustakaan RI No.B.11351/2/APB.00.02/XII.2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Perubahan Perhitungan IPLM dan TKM.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian indikator kinerja utama (indikator tujuan) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 berdasarkan Renstra PD Tahun 2025-2029, disimpulkan bahwa indikator kinerja berkriteria Sangat Tinggi yaitu Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintahan Daerah dengan realisasi 85,27 atau tercapai 98,70%. Sedangkan indikator kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dengan realisasi 8,41. Untuk indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat ini mengalami perubahan komponen

perhitungan. Target yang ditetapkan masih menggunakan rumus lama sedangkan realisasi telah menggunakan rumus baru sehingga tidak dapat dibandingkan.

Capaian kedua indikator tujuan ini masih belum maksimal atau belum mencapai target yang ditetapkan.

Adapun faktor yang menghambat capaian indikator tujuan sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

- 1) Ada perubahan rumus (komponen perhitungan) IPLM;
- 2) Waktu pendataan sedikit;
- 3) Sampel yang dibutuhkan tidak terpenuhi maksimal;
- 4) Kurangnya pemahaman responden dalam memahami pertanyaan survei;
- 5) Perpustakaan di wilayah Kabupaten Bantul banyak yang belum memiliki petugas perpustakaan;
- 6) Koleksi bacaan di perpustakaan yang ada di Kabupaten Bantul masih kurang terutama dari segi judul;
- 7) Jenis perpustakaan khusus di wilayah Kabupaten Bantul belum teridentifikasi.

b. Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintahan Daerah

- 1) Ada beberapa perubahan item pada instrumen pengawasan kearsipan eksternal;
- 2) Aplikasi Srikandi belum maksimal dilaksanakan serta belum ada aturan/pedoman tentang penerapan Srikandi di Pemerintah Kabupaten Bantul;
- 3) Pedoman tentang penyelenggaraan kearsipan di Kapanewon dan Kalurahan belum ada ;
- 4) Arsip memori kolektif bangsa belum ada karena arsip di Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul belum memenuhi syarat diajukan sebagai arsip memori kolektif bangsa.

B.1.1. Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Standar

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik ditentukan dengan tata kelola pengarsipan yang baik pula. Guna mewujudkan budaya tertib arsip dan

penyelenggaraan kearsipan berjalan secara optimal dibutuhkan pengawasan kearsipan untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan kearsipan. Dalam mewujudkan budaya tertib arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah melakukan berbagai upaya dengan melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan dan meningkatkan penyelenggaraan kearsipan sesuai standar dengan indikator kinerja cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik. Formulasi perhitungan pada Indikator ini adalah jumlah OPD yang telah melaksanakan tata kelola kearsipan dengan nilai baik dibagi jumlah OPD kali 100%.

Tabel III. 6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra Tahun 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	100	100	97,78	97,78	95	102,92

Sumber : Esakip 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 100% terealisasi sebesar 97,78% atau tercapai 97,78% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 100% atau tercapai sebesar 117,65%. Jadi realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 2,22%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 95. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 102,92% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Pada IKU ini target yang ingin dicapai adalah cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik dengan formulasi perhitungan jumlah OPD yang telah melaksanakan tata kelola kearsipan dengan nilai baik dibagi jumlah OPD kali 100%. Untuk mencapai kinerja ini dilakukan pengawasan kearsipan perangkat daerah melalui audit kearsipan internal yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul. Sedangkan unsur-unsur/aspek penilaian pada audit kearsipan internal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 7 Ekstraksi Aspek Penilaian pada Formulir Audit Kearsipan Internal

EKSTRAKSI ASPEK PENILAIAN PADA FORMULIR AUDIT KEARSIPAN INTERNAL		
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Formulir Audit Kearsipan)		
No.	Nama Formulir	Aspek/ Sub Aspek
1.	Pengelolaan Arsip Dinamis: a. Unit Pengolah	1. Penciptaan Arsip : - Pembuatan Arsip; (Penomoran, Pencantuman Kode Klasifikasi, Penggunaan Kertas, Format Naskah Dinas, Pengamanan Naskah Dinas, Pengendalian Naskah Dinas Keluar, dll.) - Penerimaan Arsip; (Pengendalian Naskah Dinas Masuk spt : Pencataan → Buku Agenda, Buku Kendali, Agenda Elektronik) 2. Penggunaan Arsip : - Ketersediaan Arsip Aktif; - Sarana Peminjaman Arsip; - Penyajian Arsip Aktif; 3. Pemeliharaan Arsip : - Pemberkasan Arsip Aktif; - Penyimpanan Arsip Aktif; - Alih Media Arsip Aktif; - Pemeliharaan Arsip Vital; - Pemberkasan dan Pelaporan Arsip Terjaga; 4. Penyusutan : - Kegiatan Pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan;
	b. Unit Kearsipan	1. Penciptaan Arsip : ❖ Pembuatan Arsip; spt = * Pencataan/ Registrasi (Buku Agenda, Kartu Kendali, Agenda Elektronik), * Pengiriman, * Penyimpanan ❖ Penerimaan Arsip; (Peregistrasian arsip, pendistribusian, pencatatan pada buku Agenda, Kartu Kendali, Agenda Elektronik, Pengarahan, Penyampaian) 2. Penggunaan Arsip : ❖ Ketersediaan Arsip Inaktif; ❖ Ketersediaan Prosedur Penggunaan Arsip Inaktif; ❖ Sarana Peminjaman Arsip; ❖ Penyajian Arsip Inaktif; 3. Pemeliharaan Arsip : ❖ Asas Penataan Arsip Inaktif; ❖ Kegiatan Penataan Arsip Inaktif; ❖ Penyimpanan Arsip Inaktif; ❖ Alih Media Arsip Inaktif; 4. Penyusutan : • Pemusnahan; • Penyerahan Arsip Statis
2.	SDM Kearsipan	UP : - Data SDM Kearsipan (Arsiparis, Pengelola Arsip) UK : - Pejabat Struktural, - Arsiparis, - Pengolah Arsip.
3.	Prasarana dan Sarana Kearsipan	UP : - Forder; - Guide/ Sekat; - Label; - Sarana Arsip Aktif; Lainnya spt : Out Indikator, Indeks, Tunjuk Silang, - Filling Cabinet; UK : - Gedung Penyimpanan Arsip Inaktif (Record Center); - Ruangan Penyimpanan Arsip; - Peralatan;

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025

Adapun hasil penilaian/audit kearsipan internal selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel III. 8 Data Hasil Penilaian Kearsipan OPD

NO	KATEGORI NILAI	JUMLAH OPD				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Sangat Memuaskan	-	-	1	2	4
2	Memuaskan	5	3	6	26	33
3	Sangat Baik	7	10	16	14	5
4	Baik	28	27	13	3	2
5	Cukup	9	5	9	-	1
6	Kurang	5	8	-	-	-
	JUMLAH	54	53	45	45	45

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025

Dari hasil nilai dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah Perangkat Daerah yang telah menyelenggarakan kearsipan sesuai standar dengan nilai minimal baik pada tahun (2021) sejumlah 40 PD (74,07%), tahun (2022) sejumlah 40 PD (75,47%), tahun 2023 sejumlah 36 PD (80%), tahun (2024) sejumlah 45 PD (100%) dan tahun 2025 sejumlah 44 PD (97,77%). Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ini rata-rata Perangkat Daerah (PD) yang telah melaksanakan tata kelola kearsipan dengan nilai minimal baik sejumlah 41 PD (85,42%).

Pengawasan Kearsipan erat kaitannya dengan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka pengembangan e-arsip dan big data kearsipan. Kualitas Pengelolaan Arsip yang diukur dengan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dari ANRI. Nilai hasil pengawasan kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dan nilai pengawasan kearsipan internal.

Sedangkan terkait dengan kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan dapat disampaikan bahwa jumlah Arsiparis se-Kabupaten Bantul berjumlah 64 personil, dengan rincian 6 personil Arsiparis Lembaga Kearsipan Daerah (LKD), 41 personil Arsiparis Perangkat Daerah, 17 personil Arsiparis Kapanewon.

Dari 45 Perangkat Daerah ada 2 Perangkat Daerah yang belum memiliki Arsiparis yaitu: DPUPKP, Dinas Pariwisata.

Tabel III. 9 Jumlah Arsiparis se-Kabupaten Bantul

NO.	Jumlah Arsiparis di Lembaga Kearsipan Daerah (LKD)	Jumlah Arsiparis di Perangkat Daerah (PD)	Kapanewon
1.	6 personil	41 personil	17 personil

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025

Faktor penghambat dalam capaian sasaran ini adalah :

- Belum optimalnya fungsi Arsiparis di sebagian Perangkat Daerah;
- Belum optimalnya prosedur baku dalam pengelolaan dan penyelamatan arsip di Perangkat Daerah;
- Belum optimalnya regulasi daerah terkait pengelolaan arsip;
- Sarana prasarana pendukung untuk pengelolaan arsip di Perangkat Daerah maupun Depo Arsip masih terbatas;
- Aplikasi Srikandi belum optimal dilaksanakan oleh Perangkat Daerah karena belum ada aturan yang mengikat.

Faktor pendorong dalam capaian sasaran ini adalah :

- Melakukan pembinaan dan pendampingan pengelolaan arsip kepada Arsiparis Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
- Melakukan pembinaan, pendampingan serta monitoring evaluasi dalam pengelolaan kearsipan di Perangkat Daerah;
- Menambah regulasi daerah terkait pengelolaan arsip;
- Menambah sarana pendukung pengelolaan arsip oleh masing-masing Perangkat Daerah dan menambah sarana pendukung untuk Depo Arsip sesuai kemampuan anggaran yang ada.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- Melakukan sosialisasi dan implementasi peraturan dan pedoman tentang Pengelolaan Kearsipan.
- Melakukan pendampingan dan pembinaan tentang kearsipan kepada Arsiparis/ Petugas Arsip di Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan, BUMD, Ormas dan Orsospol;
- Mengupayakan penambahan regulasi/pedoman tentang pengelolaan arsip;
- Sosialisasi dan mengupayakan penggunaan aplikasi Srikandi di Perangkat

Daerah;

- e. Membuka peluang Perangkat Daerah untuk berkonsultasi kepada LKD (Lembaga Kearsipan Daerah).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar. Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Arsip

Indikator : Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja , alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional.

Formula : $T = (a + i + s + j)/4$

T = tingkat ketersediaan arsip

a = persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip

i = persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip

s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik

j = persentase jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN

Target : 82,32 persen terealisasi 79,16 persen atau tercapai 96,16%.

Hasil perhitungan : $(55.60\% + 96.03\% + 88.97\% + 76.06)/4 = 79.16\%$

Program ini didukung kegiatan antara lain :

1) Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

Indikator : persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip in aktif

Formula : $(\text{jumlah PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif dibagi jumlah PD}) \times 100\%$.

Target : 90 persen terealisasi 97.78 persen atau tercapai 108.64%.

Hasil perhitungan kegiatan : $(44 \text{ PD} / 45 \text{ PD}) \times 100 = 97.78\%$

Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) sub yang dilaksanakan yaitu :

a) Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis

Indikator : Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan

Target : 100.000 berkas terealisasi 274.864 berkas

Aktivitas :

- Pendataan naskah dinas yang diciptakan dan digunakan.
Sasaran : Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan: Januari- Desember 2025
Hasil :
- Data surat masuk dan surat keluar dari Perangkat Daerah
- Pelatihan Pengelolaan Arsip Kalurahan
Sasaran : Perangkat Desa dan Lembaga Desa
Waktu pelaksanaan : Mei 2025
Tempat : Sabdodadi, Pendowoharjo, Tirtonirmolo
- Pelatihan pengelolaan arsip untuk masyarakat
Sasaran : Masyarakat umum
Waktu pelaksanaan : Juli-November 2025
Tempat : wilayah Kapanewon Bantul, Sedayu, Bambanglipuro, Piyungan

b) Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis

Indikator : Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan arsip

Target : 2000 berkas terealisasi 152827 berkas

Aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini antara lain:

- Pendataan naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan
Sasaran : arsip-arsip yang ada Perangkat Daerah maupun yang ada di Lembaga Kearsipan Daerah
Waktu pelaksanaan : Januari-Desember 2025
- Pembayaran honor tenaga non ASN yang ada di Bidang Kearsipan dari bulan Januari-Desember 2025.

c) Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota

Target : 45 laporan terealisasi 45 laporan

Aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini antara lain:

- Pelaksanaan Penilaian Pengawasan Kearsipan Internal dengan sasaran Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul yang dilaksanakan bulan Maret – Desember 2025.

- Pemenuhan bukti dukung Pengawasan Kearsipan Eksternal oleh Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul selaku Lembaga Kearsipan Daerah.

2) Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

Indikator : persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik

Formula : $(\text{jumlah dokumen arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik} / \text{jumlah arsip statis}) \times 100\%$

Target : 90% terealisasi 88.97% atau tercapai 98.86%

Hasil perhitungan : $(807/907) \times 100 = 88.97\%$

Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

a) Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis

Indikator : Jumlah Arsip Statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis.

Target : 1000 arsip terealisasi 513 arsip

Aktivitas yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini antara lain :

- Kegiatan akuisisi, pengolahan dan preservasi arsip statis
Dilakukan proses akuisisi arsip Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Kapanewon Jetis, Kantor ex Departemen Penerangan, Kantor ex Sosial Politik, Kantor Arsip Kabupaten Bantul
- Dalam rangka akses arsip statis dilakukan pengunggahan arsip statis dalam aplikasi SIKN/JIKN sejumlah 896 nomor berkas.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Indikator : tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat

Formula : $T = (m+b+g+a+c+i)/6$

T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban.

m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK

b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK

g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten dengan NSPK

a = tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK

c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK

i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK

Target : 83,34 persen terealisasi 83,33 persen atau tercapai 100%.

Hasil perhitungan : $(100\%+100\%+0\%+100\%+100\%+100\%)/6 = 83,33\%$

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun.

Indikator : persentase pemusnahan arsip yang sesuai NSPK

Formulasi : $(\text{jumlah dokumen pemusnahan arsip sesuai NSPK} / \text{jumlah dokumen arsip yang dimusnahkan}) \times 100\%$

Target : 100% terealisasi 100% atau tercapai 100%.

Hasil perhitungan : $(7856/786) \times 100 = 100\%$

Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- a) Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun.

Indikator : Jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.

Target : 2000 arsip terealisasi 7856 arsip

Aktivitas yang dilakukan pada sub kegiatan ini antara lain :

- Melaksanakan penilaian, penetapan arsip yang memiliki retensi di bawah sepuluh (10) tahun sejumlah 7856 arsip.

B.1.2 Sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Arsip

Sasaran kinerja ini sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dan dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029. Dengan sasaran kinerja ini diharapkan keseluruhan kegiatan dalam proses pengelolaan arsip dapat meningkat dan sesuai aturan yang ada. Adapun unsur utama dalam pengelolaan arsip antara lain penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan arsip, penyusutan arsip, penyelamatan arsip statis, SDM, serta sarana prasarana kearsipan. Salah satu

indicator yang digunakan dalam mengukur peningkatan kinerja pengelolaan arsip adalah Indeks Pengawasan Arsip Internal.

Tabel III. 10 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Arsip

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian terhadap Akhir Renstra Tahun 2029(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Pengawasan Arsip Internal	80,82	80,83	84,19	104,15	80,87	104,10

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 80,83 terealisasi sebesar 84,19 atau tercapai 104,15% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 80,82%. Jadi realisasi tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 3,37 poin.

Target capaian tahun 2029 (akhir Renstra) sebesar 80,87. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 104,10% dari target akhir Renstra tahun 2029.

Adapun faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja serta program yang dilaksanakan untuk sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan arsip telah diuraikan pada pembahasan sasaran meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar.





Keterangan foto: Penyerahan Reward Pengawasan Kearsipan Internal dan Penghargaan Arsiparis Berprestasi 2025

Gambar III. 1 Foto Kegiatan Urusan Kearsipan

B.2.1. Sasaran Meningkatnya Jumlah Kunjungan Pemustaka

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi yang akan memperluas wawasan, meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Menjadi kewajiban pemerintah menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul melaksanakan program dan kegiatan yang menunjang upaya pemerintah tersebut. Sasaran strategis yang diupayakan adalah meningkatnya jumlah kunjungan Pemustaka. Pada tahun 2025 sasaran strategis ini dicapai dengan 2 (dua) indikator kinerja utama sesuai yang tercantum dalam dokumen Resntra dan

1 (satu) indikator kinerja tambahan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam dokumen Renstra tahun 2021-2026 adalah:

- a. Pesentase Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan dengan formulasi perhitungan jumlah Pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan dibagi jumlah penduduk kali 100%. $(2.008.556/982.327) \times 100\% = 204,47\%$

Jumlah penduduk yang digunakan semester I

- b. Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perpustakaan.

Adapun rencana dan realisasi capaian sasaran tahun 2025 disampaikan pada tabel berikut:

Tabel III. 11 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan	182.31	183	204.47	111,73	35	584.2
2	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	90.06	90,07	90,19	100,13	87	103,66

Sumber : Esakip ROPK Tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 pada indikator persentase Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan adalah 183%, realisasi sebesar 204,47% tercapai 111,73% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 182,31%, maka realisasi tahun 2025 meningkat sebesar 22,16%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 35. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 584,2% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Berikut disampaikan realisasi kinerja Persentase Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan pada tahun 2021 s/d 2025.

Tabel III. 12 Persentase Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan

Realisasi per tahun				
2021	2022	2023	2024	2025
-18,552	111,52	145,32	182,31	204,47

Pada IKU ini target kinerja yang ingin dicapai peningkatan jumlah Pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan. Berikut ini disampaikan data pengunjung dalam tabel.

Tabel III. 13 Jumlah Pengunjung Layanan Perpustakaan

NO	TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH TOTAL
1	2021	45.878	68.447	114.325
2	2022	478.120	597.213	1.075.333
3	2023	630.514	782.262	1.412.776
4	2024	817.085	970.053	1.787.138
5	2025	895.464	1,113.092	2.008.556

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kurun waktu 2021 sampai dengan 2025 terdapat kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan. Dimana pada tahun 2021 sejumlah 114.325 kunjungan Pemustaka ke Perpustakaan, tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar 961.008, tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar 337.443, tahun 2024 terdapat kenaikan sejumlah 374.362 dan tahun 2025 terdapat kenaikan 221.418. Kenaikan tertinggi pada tahun 2022.

Kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2022 disebabkan telah dibukanya kembali layanan Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Desa, dan Perpustakaan Komunitas pasca terjadinya covid-19.

Untuk Indikator Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 90,07 realisasi 90,19 tercapai 100,13% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 90,06, maka realisasi tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,13 point.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 87. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 103,66%.

Berikut nilai SKM pada tahun 2021– 2025.

Tabel III. 14 Nilai SKM terhadap Pelayanan Perpustakaan

NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PER TAHUN				
2021	2022	2023	2024	2025
89,21	89,38	91,74	90,06	90,19

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai SKM pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,17 atau 0,19% pada tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar 2,36 atau 2,57%, pada tahun 2024 terdapat penurunan sebesar 1,68 atau 1,83% sedangkan pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,13 atau 0,14%. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kenaikan tertinggi pada tahun 2023 sedangkan penurunan nilai SKM terjadi pada tahun 2024. Penurunan nilai SKM pada tahun 2024 disebabkan karena dilaksanakannya stok opname dan proses pemindahan layanan perpustakaan ke gedung baru sehingga layanan ditutup sementara.

B.2.2. Sasaran Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Pada tahun 2025 Indeks pembangunan Literasi Masyarakat merupakan Indikator Kinerja Tambahan sebagai tindak lanjut hasil Evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN & RB sehingga tidak tercantum dalam dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul periode 2021-2026, akan tetapi tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Dalam dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan periode 2025-2029, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) ini menjadi *indikator tujuan* Perangkat Daerah sehingga pada tahun 2025 tercantum dalam Perjanjian Kinerja Perubahan 2025.

Maksud dan tujuan pengukuran IPLM adalah:

- a. Tersedianya alat ukur baku untuk IPLM yang disepakati bersama kan memudahkan dalam penyusunan pemetaan kondisi dan perkembangan semua jenis perpustakaan baik level daerah maupun pusat.
- b. Tersedianya format baku penyajian hasil pengukuran IPLM. Format baku ini akan memudahkan dalam penyusunan, penggunaan dan pengembangan system pengukuran IPLM.
- c. Tersedianya pengelolaan data dan system data IPLM yang terpadu, terintegrasi, dan diinput secara berkelanjutan.
- d. Terwujudnya akselerasi dan peningkatan kinerja pengelola dan penyelenggara perpustakaan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam pembinaan perpustakaan di wilayahnya.

Perhitungan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) pada tahun 2025 ini mengalami perubahan komponen perhitungan. Adapun rumus awal sebagai berikut:

Indek Pembangunan Literasi Masyarakat dengan formulasi perhitungan

$$\sum \frac{UPLM}{ALM} \times 100\%$$

Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM). Unsur UPLM ada 7 (tujuh) yaitu :

- UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan
- UPLM 2 = Ketercukupan koleksi
- UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan
- UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan

- UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP
- UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Perpustakaan
- UPLM 7 = Anggota perpustakaan

IPLM adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Karakteristik IPLM lebih memfokuskan pada pengembangan dan penguatan kelembagaan dan infrastruktur perpustakaan.

Berdasarkan Surat Edaran Perpustakaan Nasional RI Nomor B.11351/2/APB.00.02/XII.2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Edaran Penyesuaian Target IKK Daerah Urusan Perpustakaan Terkait Perubahan Penghitungan IPLM dan TKM, maka penyesuaian rumus perhitungan sebagai berikut:

Rumus Penghitungan Indeks

$$IPLM = ((0.30 \times \text{Dimensi Kepatuhan}) + (0.70 \times \text{Dimensi Kinerja})) \times 100$$

Komponen pengukuran ini menjadi 2 (dua) dimensi yaitu dimensi kepatuhan dan dimensi kinerja. Berikut tabel komponen pengukuran IPLM:

Tabel III. 15 Tabel Komponen Pengukuran IPLM

DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
Kepatuhan	Koleksi	Jumlah keseluruhan bahan perpustakaan dalam bentuk fisik yang dimiliki	Jumlah keseluruhan bahan pustaka dalam bentuk fisik yang dimiliki oleh perpustakaan.
		Jumlah keseluruhan bahan perpustakaan dalam bentuk digital yang dimiliki	Jumlah keseluruhan bahan pustaka dalam format digital yang dimiliki dan diperoleh perpustakaan secara resmi (jual beli, hibah, hadiah, atau tukar menukar) serta dapat diakses oleh pemustaka
		jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dipinjam, dibaca di tempat, atau silang pinjam dalam 1 (satu) tahun terakhir	Jumlah bahan pustaka cetak yang dipinjam, dibaca di tempat, atau silang pinjam koleksi yang digunakan oleh pemustaka dalam satu tahun terakhir
		Jumlah akses atau penggunaan bahan	Jumlah akses atau penggunaan bahan

		perpustakaan dalam bentuk digital oleh pemustaka dalam 1 (satu) tahun terakhir	perpustakaan dalam bentuk digital oleh pemustaka, misalnya unduhan, kunjungan, atau pencarian dalam basis data elektronik dalam satu tahun terakhir
		Jumlah koleksi dari bahan perpustakaan tercetak yang ditambahkan ke dalam koleksi perpustakaan dalam 1 (satu) tahun terakhir	Jumlah koleksi dari bahan perpustakaan tercetak yang ditambahkan ke dalam koleksi perpustakaan dalam satu tahun terakhir
		Jumlah koleksi dari bahan perpustakaan digital yang ditambahkan ke dalam koleksi perpustakaan dalam 1 (satu) tahun terakhir	Jumlah koleksi dari bahan perpustakaan digital yang ditambahkan ke dalam koleksi perpustakaan dalam satu tahun terakhir
		Jumlah anggaran pengembangan bahan perpustakaan bentuk fisik dan digital dalam 1(satu) tahun terakhir	Jumlah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait selama satu tahun anggaran untuk membeli, menambah, atau memperbarui koleksi bahan perpustakaan, baik berupa buku cetak maupun bahan digital (e-book, jurnal elektronik, dan sumber digital lainnya)
	Tenaga	Jumlah tenaga perpustakaan yang memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Diploma (D3) di bidang Ilmu Perpustakaan .	Jumlah pustakawan dan tenaga teknis yang memiliki latar belakang pendidikan minimal Diploma (D3) di bidang Ilmu Perpustakaan
		Jumlah tenaga Perpustakaan yang memiliki surat keputusan dari lembaga	Jumlah pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan yang memiliki surat keputusan resmi dari lembaga/yayasan
		Jumlah tenaga Perpustakaan yang mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam kurun	Jumlah pustakawan dan tenaga teknis yang mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB), seperti pelatihan, seminar, lokakarya,

		waktu 1 (satu) tahun terakhir	sertifikasi, atau kegiatan sejenis yang mendukung kinerja perpustakaan yang dibuktikan dengan sertifikat yang mencantumkan jam pelatihan dalam kurun waktu satu tahun terakhir
		Jumlah Anggaran pengembangan keprofesian (diklat) tenaga perpustakaan dalam 1 tahun terakhir	Jumlah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait selama satu tahun anggaran untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, kursus, workshop, atau program peningkatan kompetensi lainnya bagi pustakawan dan tenaga teknis
Kinerja	Pelayanan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan yang bertujuan meningkatkan minat baca dan keterampilan literasi yang diselenggarakan oleh Perpustakaan dalam 1 (satu) tahun terakhir	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan yang bertujuan meningkatkan minat baca dan keterampilan literasi yang diselenggarakan oleh Perpustakaan dalam satu tahun terakhir
		Jumlah pemustaka yang menggunakan layanan perpustakaan, baik luring maupun daring dalam 1 (satu) tahun terakhir	Jumlah pemustaka yang menggunakan layanan perpustakaan, baik luring maupun daring dalam satu tahun
		Jumlah pemustaka yang memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi di Perpustakaan dalam 1 (satu) tahun terakhir	Jumlah pemustaka yang memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi di Perpustakaan dalam satu tahun terakhir, misalnya komputer, internet, perangkat lunak edukatif, audio book, atau akses ke basis data digital
	Penyelenggaraan dan Pengelolaan	Jumlah program atau kegiatan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan untuk meningkatkan minat baca dan keterampilan literasi pengguna dalam 1 (satu) tahun terakhir	Jumlah program atau kegiatan yang diselenggarakan oleh perpustakaan untuk meningkatkan minat baca dan keterampilan literasi pengguna dalam satu tahun terakhir, misalnya lokakarya (workshop)

			literasi, program membaca, seminar edukasi, kegiatan penjangkauan pemustaka diluar perpustakaan, atau kegiatan literasi digital
		Jumlah kerja sama yang dilakukan perpustakaan dengan pihak eksternal dalam upaya meningkatkan layanan dan pengembangan Perpustakaan dalam 1 (satu) tahun terakhir	Jumlah kerja sama formal atau informal yang dilakukan perpustakaan dengan pihak eksternal, seperti institusi pendidikan, komunitas literasi, penerbit, atau perusahaan, dalam upaya meningkatkan layanan dan pengembangan perpustakaan dalam satu tahun terakhir
		Jumlah berbagai jenis layanan yang tersedia di perpustakaan, baik dalam bentuk fisik maupun digital	Jumlah berbagai jenis layanan yang tersedia di perpustakaan, baik dalam bentuk fisik maupun digital
		Jumlah dokumen kebijakan, pedoman, dan prosedur tertulis yang mengatur penyelenggaraan layanan Perpustakaan	Jumlah dokumen kebijakan, pedoman, dan prosedur tertulis yang mengatur penyelenggaraan layanan perpustakaan, misalnya layanan peminjaman, referensi, ruang baca, pocadi, perpustakaan keliling, e-library, akses database online, katalog digital dan lain-lain
		Jumlah anggaran untuk peningkatan pelayanan dan pengelolaan perpustakaan selama satu tahun terakhir	Jumlah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait dalam satu tahun anggaran untuk mendukung kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, serta pengembangan layanan perpustakaan, termasuk sarana prasarana, teknologi informasi, dan program layanan kepada masyarakat

Sumber: Perpunas RI 2025

Adapun rencana dan realisasi capaian sasaran tahun 2025 disampaikan pada tabel berikut:

Tabel III. 16 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)*	82,60	82,70*	8,41**	-	-	-

Sumber : Esakip ROPK Tahun 2025

Keterangan : * Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan indikator kinerja tambahan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN RB. Indikator ini tercantum dalam PK Murni Tahun 2025

**Realisasi IPLM tidak dapat dibandingkan karena ada perubahan komponen perhitungan (rumus) sesuai Surat Edaran Perpustnas RI No.B.11351/2/APB.00.02/XII.2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Perubahan Perhitungan IPLM dan TKM. Hasil IPLM diperoleh dari Perpustnas RI

Pada indikator kinerja Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) terealisasi pada angka 8,41. Realisasi ini tidak dapat dibandingkan dengan dengan target 2025 maupun realisasi pada tahun 2024 karena terjadi perubahan komponen perhitungan sesuai dengan Surat Edaran Perpustakaan Nasional RI Nomor No.B.11351/2/APB.00.02/XII.2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Perubahan Perhitungan IPLM dan TKM.

Berikut nilai IPLM tahun 2022 – 2025:

Tabel III. 17 Hasil Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Bantul Tahun 2022-2025

HASIL IPLM PER TAHUN				
2021	2022	2023	2024	2025
-	65,717	68,60	82,60	8,41*

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025

Keterangan: * Hasil IPLM Tahun 2025 menggunakan rumus/komponen perhitungan baru

Hasil IPLM dari Perpustnas RI (Surat No. B.844/4/APB.00.02/II.2026 tentang Penyampaian Hasil Pengukuran IPLM dan TKM 2025)

Dari tabel III.17 dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 hasil IPLM sebesar 65,717, pada tahun 2023 sebesar 68,60, pada tahun 2024 sebesar 82,60 dan pada tahun 2025 sebesar 8,41. Indikator ini pada tahun 2023 mengalami kenaikan 2,89 atas hasil IPLM 2022, pada tahun 2024 mengalami kenaikan 14 atas hasil IPLM

2023 dan pada tahun 2025 tidak dapat diperbandingkan karena adanya perubahan komponen perhitungan.

B.2.3. Sasaran Meningkatnya Budaya Gemar Membaca

Sesuai dengan dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, sasaran urusan perpustakaan adalah meningkatnya budaya gemar membaca dengan indikator Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TKM). Formulasi perhitungan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat telah mengalami perubahan komponen perhitungan sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran dari Perpustakaan Nasional RI Nomor B.11351/2/APB.00.02/XII.2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Edaran Penyesuaian target IKK Daerah Urusan Perpustakaan terkait Perubahan Perhitungan IPLM dan TKM. Berikut disampaikan formula perhitungan TKM sebelum perubahan dan setelah perubahan.

Formula perhitungan/rumus lama:

$$\text{Jumlah TGM} = (0,3\text{TFM} + 0,3\text{TDM} + 0,3\text{TJB} + 0,05\text{FAI} + 0,05\text{DAI})$$

Dimensi TGM : FM (Frekuensi membaca), DM (Durasi Membaca), JB (Jumlah Bahan Bacaan), FAI (Frekuensi Akses Internet), DAI (Durasi Akses Internet).

Formula perhitungan/rumus baru :

$$\text{TKM} = ((0.15 \times \text{Pra Membaca}) + (0.50 \times \text{Saat Membaca}) + (0.35 \times \text{Pasca Membaca})) \times 100$$

Berikut Tabel Komponen Pengukuran Tingkat Kegemaran Membaca (TKM)

Tabel III. 18 Tabel Komponen Pengukuran TKM

Dimensi	Variabel	Indikator	Deskripsi Singkat
Pra membaca	Motivasi Membaca	Minat Membaca Intrinsik	Keinginan untuk membaca karena kesenangan atau rasa ingin tahu, tanpa imbalan eksternal.
		Tujuan Membaca (<i>Goal Orientation</i>)	Sasaran atau tujuan yang ingin dicapai anak melalui membaca (mis. mencari informasi, hiburan, atau tugas sekolah).
		Keyakinan Diri (<i>Reading Self-Efficacy</i>)	Sejauh mana peserta yakin dapat memahami dan menyelesaikan teks bacaan dengan baik.
		Motivasi Ekstrinsik	Faktor pendorong dari luar diri, misalnya pujian guru/orang tua, nilai, penghargaan untuk melakukan kegiatan membaca.
	Model Akses dan Kebiasaan Membaca	Ketersediaan Bahan Bacaan	Jumlah dan jenis bahan bacaan yang mudah diakses (di rumah, perpustakaan, digital).
		Frekuensi Membaca Sebelumnya	Seberapa sering anak melakukan membaca sukarela dalam periode tertentu.
		Durasi Membaca	Rata-rata waktu yang dihabiskan untuk membaca setiap kali sesi.
		Lingkungan Mendukung	Adanya dukungan fisik (ruang tenang, penerangan baik) dan sosial (didampingi orang tua/guru) saat membaca.
	Pembelajaran Sosial	Modeling Orang Tua	Seberapa sering orang tua atau pengasuh terlihat membaca dan mendorong anak meniru.
		Pengarahan Tokoh Publik	Frekuensi Tokoh Publik (influencer, politisi, duta baca, toko masyarakat, dll) memberikan arahan, rekomendasi buku, atau melakukan kegiatan membaca bersama di kelas.
		Pengaruh Teman Sebaya	Dukungan atau dorongan teman sebaya untuk membaca misalnya diskusi kelompok bacaan, rekomendasi buku.
		Sosialisasi Literasi	Kegiatan bersama (klub buku, story time) di mana anak belajar budaya membaca melalui interaksi sosial.
	Konsep Budaya Literasi	Nilai Sosial Terhadap Membaca	Persepsi anak tentang pentingnya membaca dalam konteks keluarga dan masyarakat.
		Norma Budaya Membaca	Kebiasaan dan tradisi lokal misalnya gotong royong membaca, perayaan literasi yang membentuk sikap terhadap membaca.
		Partisipasi Komunitas	Keterlibatan anak dalam acara atau program literasi komunitas (kampanye membaca, lomba membaca).
		Akses ke Media Budaya	Ketersediaan sumber bacaan alternatif (media audio, video literasi) yang mencerminkan nilai

			budaya setempat dan mendorong keragaman pengalaman membaca.
Saat Membaca	Perilaku Membaca	Fokus Perhatian	Tingkat konsentrasi pembaca terhadap teks selama proses membaca misalnya kemampuan mempertahankan perhatian tanpa terganggu.
		Strategi Pemahaman	Penggunaan teknik kognitif: merangkum isi, memprediksi kelanjutan teks, mengajukan pertanyaan, menyimpulkan makna.
		Interaksi dengan Teks	Aktivitas anotasi: memberi tanda, mencatat di margin, atau menyorot kata/frasa penting untuk mendukung pemahaman.
		Pemantauan Pemahaman	Kemampuan pembaca mengecek dan memperbaiki pemahaman diri sendiri, misal berhenti untuk mereview bagian yang kurang jelas.
	Literasi Sosial	Diskusi Teks	Partisipasi aktif dalam dialog mengenai isi, ide, dan implikasi teks dengan teman atau kelompok belajar.
		Kolaborasi Membaca	Kegiatan membaca bersama (<i>paired reading</i> , klub buku kecil) di mana pembaca saling mendukung dan berbagi pemahaman.
		Negosiasi Makna	Proses tawar-menawar interpretasi teks antar pembaca, misal menyepakati arti istilah, tema, atau pesan penulis.
		Praktik Sosial Kontekstual	Keterlibatan dalam praktik budaya literasi (<i>story circle</i> , drama baca, presentasi kutipan) dalam komunitas atau lingkungan sosial pembaca.
Pasca Membaca	Dampak Membaca	Perkembangan Kognitif	Meningkatnya kemampuan memahami teks, berpikir kritis, dan keterampilan berbahasa setelah kegiatan membaca.
		Perkembangan Sosial	Peningkatan keterampilan interaksi, komunikasi, dan kolaborasi melalui diskusi atau kegiatan membaca bersama.
		Perkembangan Emosional	Perubahan regulasi emosi, empati, dan motivasi emosional sebagai respons terhadap konten bacaan.
	Nilai Harapan (<i>Expectancy Value</i>)	Ekspektansi Keberhasilan	Keyakinan diri/prediksi keberhasilan dalam memahami dan menyelesaikan teks bacaan.
		Nilai Tugas	Persepsi nilai intrinsik, utilitas, kepentingan, dan biaya (<i>cost</i>) yang diasosiasikan dengan aktivitas membaca.
Perspektif TKM berdasarkan Perpustakaan	Interaksi dengan Perpustakaan	Akses Fisik dan Digital Perpustakaan	Kemudahan pengguna menjangkau perpustakaan (lokasi, jam operasional) dan platform digital (e-katalog, website, app).
		Motivasi Menggunakan Perpustakaan	Dorongan intrinsik/ekstrinsik untuk meminjam atau mengikuti program literasi di perpustakaan.
		Frekuensi Kunjungan Perpustakaan	Seberapa sering pengguna datang luring atau daring ke perpustakaan dalam periode tertentu.
		Interaksi dengan Pustakawan dan Komunitas	Tingkat keterlibatan dalam diskusi, konsultasi, atau kegiatan bersama pustakawan dan komunitas pembaca.
		Pemanfaatan Koleksi Digital dan Cetak	Intensitas penggunaan sumber informasi dalam format cetak maupun digital yang tersedia di perpustakaan.
		Penerapan Pengetahuan dari Perpustakaan	Sejauh mana informasi dari perpustakaan diimplementasikan dalam tugas, pekerjaan, atau aktivitas sehari-hari.
		Rekomendasi dan Berbagi Informasi	Frekuensi dan kualitas berbagi atau merekomendasikan bacaan kepada teman, kolega, atau komunitas setelah kunjungan.
		Kepuasan	Tingkat kepuasan pengguna terhadap

Adapun rencana dan realisasi capaian pada tahun 2025 disampaikan pada table berikut:

Tabel III. 19 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran (sesuai PK Perubahan) Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian terhadap 2029 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indikator Sasaran : Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	80,89	81,14*	55,93**	-	-	-

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025

Keterangan: * Penentuan target menggunakan rumus lama

** Realisasi dihitung dengan rumus baru sesuai Surat Edaran Perpustakaan RI No.B.11351/2/APB.00.02/XII.2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Perubahan Perhitungan IPLM dan TKM

Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 81,14 (rumus lama) realisasi 55,93 (rumus baru). Realisasi ini tidak dapat dibandingkan dengan target 2025 maupun realisasi pada tahun 2024 karena adanya perubahan komponen perhitungan, Dimana target yang ditetapkan masih menggunakan rumus lama sedangkan realisasi telah menggunakan rumus baru. Berikut nilai TKM tahun 2022 – 2025:

Tabel III. 20 Hasil Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM)
Kabupaten Bantul

HASIL TKM PER TAHUN				
2021	2022	2023	2024	2025
-	58,26	72,1	80,89	55,93*

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025

*Hasil TKM dari Perpustakaan RI (Surat No. B.844/4/APB.00.02/II.2026 tentang Penyampaian Hasil Pengukuran IPLM dan TKM 2025)

Dari tabel III.18 dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 hasil TKM sebesar 58,26, pada tahun 2023 sebesar 72,1, pada tahun 2024 sebesar 82,89 dan pada tahun 2025 sebesar 55,93. Indikator ini pada tahun 2023 mengalami kenaikan 13,84 point atas hasil TKM 2022, pada tahun 2024 mengalami kenaikan 8,79 point atas hasil TKM 2023 dan pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan karena terjadi perubahan rumus/komponen perhitungan.

Faktor penghambat capaian sasaran meningkatnya jumlah kunjungan pemustaka, sasaran meningkatnya Indeks pembangunan Literasi Masyarakat dan meningkatnya budaya gemar membaca adalah :

- a. Belum meratanya akses terhadap layanan perpustakaan dan bahan bacaan di masyarakat;
- b. Koleksi perpustakaan (tercetak maupun digital) terbatas;
- c. Terbatasnya Pustakawan dan Tenaga Perpustakaan baik jumlah maupun kompetensinya;
- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber informasi, tempat belajar untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan;
- e. Terbatasnya sarana prasarana dan dukungan TIK untuk layanan perpustakaan;
- f. Terbatasnya program kegiatan yang diselenggarakan oleh perpustakaan untuk meningkatkan minat baca dan ketrampilan literasi;
- g. Masih kurangnya kerjasama yang dilakukan perpustakaan dengan pihak eksternal (istitusi pendidikan, komunitas literasi, penerbit, perusahaan) dalam rangka meningkatkan layanan dan pengembangan perpustakaan;
- h. Adanya perubahan komponen perhitungan pada IPLM dan TKM.

Faktor pendorong capaian capaian sasaran meningkatnya jumlah kunjungan pemustaka adalah :

- a. Mendekatkan dan menambah akses layanan perpustakaan serta bahan bacaan ke masyarakat dengan layanan keliling, penambahan pojok baca;
- b. Adanya keragaman layanan perpustakaan dan pemanfaatan teknologi informasi;
- c. Dilaksanakan pembinaan dan pelatihan pengelolaan perpustakaan kepada pengelola perpustakaan;
- d. Dikembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan kegiatan pemberian buku, rak, komputer dan pelatihan berbasis buku terapan kepada masyarakat;
- e. Adanya penambahan koleksi bahan Pustaka melalui hibah masyarakat, pengadaan buku dan melalui link e book gratis;
- f. Terjalinnya kerjasama/bermitra dengan pemangku kepentingan, institusi Pendidikan, pegiat literasi serta masyarakat untuk ikut mempromosikan perpustakaan.
- g. Ada upaya menambah program kegiatan yang mendukung peningkatan minat baca dan ketrampilan literasi (seperti kegiatan dengan DAK Non Fisik);
- h. Adanya gedung layanan Perpustakaan Umum Daerah yang representatif.

Langkah strategis kedepan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan IKU Persentase Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan, Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan perpustakaan dan Indek Pembangunan Literasi Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pembinaan pengelolaan perpustakaan agar semakin banyak perpustakaan yang dapat diakses oleh masyarakat;
- b. Meningkatkan pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
- c. Meningkatkan kerjasama dengan pihak eksternal (seperti institusi pendidikan, komunitas literasi, penerbit, perusahaan, dll) untuk terlibat dalam upaya meningkatkan layanan dan pengembangan pengelolaan perpustakaan;
- d. Menambah program kegiatan yang mendukung peningkatan minat baca serta ketrampilan literasi;
- e. Menambah inovasi layanan perpustakaan dan mengoptimalkan layanan perpustakaan secara online.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya jumlah kunjungan Pemustaka, meningkatnya IPLM dan meningkatnya budaya gemar membaca Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Indikator : persentase perpustakaan yang terakreditasi

Formulasi : jumlah perpustakaan terakreditasi dibagi jumlah perpustakaan di wilayahnya kali 100%

Target 17,48 persen terealisasi 16,25 persen atau tercapai 92,96%.

Hasil perhitungan : $(79/486) \times 100 = 16,25\%$

Program ini didukung oleh 2 kegiatan 7 sub kegiatan antara lain :

1) Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah kabupaten/Kota

Indikator : jumlah pelaksanaan pembinaan perpustakaan

Formula : jumlah perpustakaan yang dibina dalam rangka akreditasi

Target : 53 perpustakaan terealisasi 79 perpustakaan atau 149,06%.

Kegiatan ini didukung oleh 4 (empat) sub kegiatan antara lain :

a) Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah

Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya

Target : 5 perpustakaan terealisasi 4 perpustakaan atau 80%.

Aktivitas kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Pembinaan Perpustakaan dalam rangka akreditasi perpustakaan
Adapun hasil akreditasi perpustakaan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut

Tabel III. 21 Hasil Akreditasi Perpustakaan (Reguler) Tahun 2025

No	Nama Perpustakaan	Nama Sekolah	Nilai
1	Melati	SDN 2 Padokan Kasihan	B
2	Edelweiss	SD Jetis	A
3	Lentera Aksara	SMP 3 Kasihan	A
4	Literarium Library	MTs 9 Bantul	A

Sumber; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2025

- Talkshow Literasi dalam rangka akreditasi perpustakaan
Dilaksanakan di SD Muh. Sumbermulyo, SD Muh. Kalinampu, Universitas Islam Mulia.
- Talkshow Literasi di Kalurahan
Dilaksanakan di Kalurahan Wirokerten, Kalurahan Srimulyo, Kalurahan Parangtritis.

b) Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan melalui Peningkatan Koleksi.

Target : 5 layanan terealisasi 5 layanan atau 100%

Aktivitas kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Melaksanakan layanan perpustakaan keliling, layanan perpustakaan mandiri, layanan perpustakaan kantor, layanan perpustakaan online serta layanan pojok baca
- Untuk layanan pojok baca/pengadaan pojok baca dilaksanakan di Pedukuhan Kebosungu II, Dlingo; Yayasan Sabilussalam, Banguntapan;
- Festival Literasi di Pendopo Komplek Pemda II Manding
- Pembayaran Tenaga Non ASN selama 1 tahun.

c) Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan

Indikator: Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan

Target: 2 dokumen terealisasi 2 dokumen atau 100%

Aktivitas kegiatan yang dilaksanakan:

- Identifikasi dan pendaftaran naskah kuno nusantara di Museum Sekartaji, Rumah Budaya Tembi, Rumah Bapak Surojo, Pajimatan Imogiri.
- Pendataan perpustakaan dengan hasil 32 perpustakaan didaftarkan ke dalam aplikasi Perpustakaan Nasional (data.perpusnas.go.id) untuk selanjutnya melaporkan data statistik secara berkala ke dalam aplikasi.
- Survei/kajian IPLM dan TGM

d) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

Indikator : Jumlah bahan perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan

Target : 675 eksemplar terealisasi 2395 eksemplar atau 354,81%

Aktivitas kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Pengelolaan bahan pustaka yang meliputi memperbaiki buku cetak yang rusak, mengolah buku cetak baru dan mengolah e-book.
- Pengadaan/pembelian buku cetak baru
- Pembayaran tenaga non ASN selama 1 tahun

2) Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator : Laporan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat

Formula : Jumlah laporan pemasyarakatan gemar membaca

Target : 1 laporan terealisasi 1 laporan

Kegiatan ini didukung oleh beberapa sub kegiatan antara lain:

a) Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

Target: Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan

Target: 2 perpustakaan terealisasi 2 perpustakaan atau 100%

Aktivitas kegiatan yang dilaksanakan:

- Kegiatan pembinaan dan penyerahan bantuan sarana perpustakaan (computer, rak buku, buku) di Kalurahan Wukirsari dan penyerahan buku ke SD 1 Kasihan
- Pelatihan inklusi social berbasis buku di Nangsib Keramik Kalurahan Bangunjiwo.

b) Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat

Indikator : Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat

Target : 13 lokus terealisasi 13 lokus atau 100%

Aktivitas kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- Bedah buku 13 lokus;
- Bimtek kepenulisan berbasis konten budaya lokal untuk guru, tenaga perpustakaan, pegiat literasi dan masyarakat umum;
- Bimtek membaca nyaring untuk guru, pustakawan, pegiat literasi orang tua;
- Lomba Bertutur Tingkat SD.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya serta layanan kepada masyarakat. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah:

BANTUL PINTER (PengemBANgan TerpadU Layanan Perpustakaan TerINtegrasi InTernet)

BANTUL PINTER merupakan Sistem Perpustakaan Terintegrasi Berbasis Internet (*online*). Akses secara online memudahkan berbagai layanan perpustakaan dapat diterima oleh masyarakat secara sederhana. Aplikasi BANTUL PINTER dapat membantu masyarakat luas mencari informasi bahan pustaka cetak, pustaka digital (*e-book*), dan pustaka multimedia tanpa datang langsung ke Perpustakaan Umum Kabupaten Bantul.

Melalui aplikasi BANTUL PINTER masyarakat dapat mengakses daftar koleksi yang dimiliki Perpustakaan (*Online Public Access Catalog = OPAC*) yang terdiri dari pustaka cetak, pustaka digital, dan pustaka multimedia. Masyarakat yang sudah memiliki ID Member (Kartu Anggota) juga dapat langsung membaca dan mengunduh pustaka digital melalui perangkat TIK.

Pada pengembangannya pada saat ini aplikasi Bantul Pinter sudah bisa diunduh melalui Playstore.

Manfaat yang diperoleh dari inovasi ini adalah:

1. Masyarakat dapat mengakses koleksi buku digital melalui perangkat TIK

2. Masyarakat dapat melihat daftar judul buku dan ketersediaannya
3. Masyarakat dapat mengetahui riwayat koleksi yang pernah dipinjam
4. Masyarakat dapat berpartisipasi memberikan usulan untuk kebutuhan pengadaan koleksi baru
5. Masyarakat dapat meminjam dan mengembalikan buku dimanapun ada layanan perpustakaan
6. Pengelolaan koleksi dapat dilakukan secara online
7. Mempermudah akses bacaan untuk anak
8. Memberikan informasi tentang pelayanan anak
9. Turut mendukung tercapainya program Smart City Bantul
10. Turut mendukung terwujudnya ekosistem digital secara nasional koleksi buku digital dengan cara login.

Inovasi layanan perpustakaan tersebut sudah sejak tahun 2020 digunakan dan dilakukan pengembangan. Untuk tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul telah mengembangkan BANTUL PINTER tersebut bisa diakses oleh pemustaka di seluruh Indonesia.

Inovasi tersebut adalah “PASEBAN JELITA” (Pengembangan Akses Berbasis Layanan Jelajah Literasi Tanpa Batas). Inovasi ini bertujuan meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat melalui berbagai kegiatan layanan perpustakaan dan layanan aplikasi digital yang dirancang dan dibangun untuk keperluan membaca dan meminjam buku, ruang belajar, akses berita dan informasi, ilmu pengetahuan, jurnal, penelitian secara online dan dapat diakses oleh pemustaka di seluruh Indonesia. Dengan kemudahan akses ini diharapkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi sehingga jumlah pemustaka juga makin merata dan tinggi yang pada akhirnya mendorong terwujudnya masyarakat literat, unggul, berkarakter, dan berbudaya istimewa.



Keterangan Foto: Kegiatan Penyerahan Pojok baca Sabilussalam, Banguntapan



Keterangan Foto: Kegiatan Talkshow Literasi di Kalurahan Srimulyo, Piyungan

Gambar III. 2 Foto Kegiatan Urusan Perpustakaan

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp8.193.539.258,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp7.362.183.760,00 atau sebesar 89,85%.

Alokasi anggaran belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III. 22 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar	462.917.044,00	5,65%
2	Meningkatnya jumlah kunjungan pemustaka	1.945.701.788,00	23,75%
Jumlah		2.408.618.832,00	29,40%
Belanja Pendukung		5.784.920.426,00	70,60%
Total Belanja		8.193.539.258,00	100%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel di atas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp2.408.618.832,00 atau sebesar 29,40% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp5.784.920.426,00 atau sebesar 70,60% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya jumlah kunjungan Pemustaka dengan besaran anggaran 23,75% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar sebesar 5,65% dari total anggaran belanja.

Belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul terdiri dari Belanja Operasi (Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa) dan Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya). Dalam belanja pegawai

terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp5.093.849.987,00 terealisasi sebesar 85,14%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2025 sebesar 89,20% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 97,74%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 86,57%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik dengan nilai baik sebesar 99,20%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU persentase pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan sebesar 97,40%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar menyerap paling besar yaitu 99,20% dari target. Sedangkan meningkatnya jumlah kunjungan pemustaka menyerap anggaran terkecil yaitu 97,40% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut

Tabel III. 23 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	100	97,78	97,78	462.917.044,00	459.223.520,00	99,20
2	Persentase peningkatan pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	183	204,47	111,73	1.945.701.788,00	1.895.016.684,00	97,40

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	90,07	90,19	100,13	0	0	0
4	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)*	82,70**	4,04***	-	0	0	0

Sumber : Dispusip 2025

Keterangan:

* IPLM merupakan indikator kinerja tambahan atas hasil evaluasi SAKIP daei KemenPANRB Tahun 2022

**Target indikator IPLM masih menggunakan rumus/komponen perhitungan lama

***Realisasi IPLM sudah menggunakan rumus/komponen perhitungan baru

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja tahun 2025 sebesar 10,15%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,66%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 9,48%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU persentase pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan sebesar 0,62% sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik sebesar 0,05%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran meningkatnya jumlah kunjungan pemustaka efisiensi anggarannya paling besar yaitu 0,62% dari anggaran target. Sedangkan sasaran meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar memiliki efisiensi terkecil yaitu 0,05% dari anggaran target.

Adapun efisiensi tersebut terdapat pada:

1. Efisiensi gaji dan tunjangan ASN karena ada pegawai yang pensiun;
2. Efisiensi penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dari honorarium PPTK yang tidak terserap karena tidak ada personil yang mengampu;
3. Efisiensi dari BPJS Kesehatan karena ada beberapa Tenaga Non ASN (PHL) yang ikut BPJS PBI (pemerintah) dan ikut BPJS suami/isteri;
4. Efisiensi gaji Tenaga Non ASN (PHL) karena diterima sebagai CPNS;
5. Efisiensi dari pembayaran pajak kendaraan karena ada kendaraan yang dihapus dan tagihan pajak kendaraan dibawah SHBJ;
6. Efisiensi dari sisa pengadaan barang dan jasa seperti pengadaan buku,gazebo pojok baca, sarana penyimpanan arsip (roll opec), dan sisa kegiatan DAK Non Fisik.

Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III. 24 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	462.917.044,00	459.223.520,00	3.693.524,00	0.05
2	Persentase pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	1.945.701.788,00	1.895.016.684,00	50.685.104,00	0,62
Jumlah					
Belanja Pendukung		5.784.920.426,00	5.007.942.556,00	776.977.870,00	9,48
Total Belanja		8.193.539.258,00	7.362.182.760,00	831.356.498,00	10,15

Sumber : Esakip ROPK 2025

E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarusutamaan Gender

Dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana tertuang dalam peraturan Bupati Bantul nomor 30 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Bantul, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul memiliki peran strategis dalam menghadirkan layanan perpustakaan yang responsif gender.

Peran tersebut diwujudkan melalui upaya memastikan akses yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki, serta kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu rumah tangga, anak-anak, serta masyarakat dengan keterbatasan ekonomi dan geografis. Implementasi pengarusutamaan gender dilakukan melalui penyediaan koleksi bacaan yang inklusif, pelaksanaan program literasi yang mempertimbangkan kebutuhan gender dan kelompok rentan, serta penerapan kebijakan pengelolaan perpustakaan yang mendorong partisipasi aktif seluruh pemustaka.

Untuk memperluas jangkauan layanan literasi hingga tingkat kewilayahan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul didukung oleh 75 perpustakaan desa yang tersebar di seluruh kapanewon serta 103 Taman Bacaan Masyarakat (TBM) atau perpustakaan komunitas di wilayah Kabupaten Bantul. Keberadaan jaringan perpustakaan desa dan komunitas ini menjadi sarana strategis dalam mendekatkan akses informasi dan literasi kepada masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan di wilayah pedesaan.

Sedangkan untuk layanan di Perpustakaan Daerah telah didukung dengan lokasi strategis, sarana prasarana perpustakaan representatif serta bahan bacaan yang memadai. Adapun koleksi bacaan yang dimiliki Perpustakaan Daerah sebanyak 39.215 judul dengan koleksi buku anak sebanyak 10.550 (26.90%) judul. Koleksi buku anak ini terdiri dari 10.004 judul buku tercetak dan 546 judul buku digital. Jumlah judul buku anak sebesar 26.90% dari keseluruhan judul buku yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah sudah sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dengan kategori A (Sangat Baik).

Dengan pendekatan tersebut, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai pusat informasi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat yang mendukung terwujudnya kesetaraan gender dan inklusivitas dalam akses serta pemanfaatan layanan

literasi. Hal ini tercermin pada tabel III.11. Jumlah Pengunjung Layanan Perpustakaan, di mana selama periode tahun 2021–2025 jumlah pengunjung perpustakaan didominasi oleh pengunjung perempuan, yang menunjukkan tingginya partisipasi perempuan dalam pemanfaatan layanan perpustakaan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan gender.

F. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul tidak memiliki program kegiatan yang bersifat lintas sektor. Akan tetapi kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan secara tidak langsung mendukung sasaran daerah:

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel;
2. Terwujudnya pemerataan dan daya saing Pendidikan

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak dua (2) sasaran, tiga (3) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan satu (1) sasaran satu (1) Indikator Kinerja Utama (IKU) tambahan yang tertuang dalam Perjajian Kinerja Murni Tahun 2025, dan dua (2) sasaran 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Realisasi masing-masing IKU ada yang tercapai sesuai target, bahkan ada yang melebihi target, akan tetapi ada IKU yang tidak mencapai target.

Dalam pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2025 antara lain adalah:

1. Adanya koodinasi antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan perangkat daerah, kalurahan, institusi pendidikan, lembaga pemerintah , pegiat literasi, dan masyarakat;
2. Partisipasai aktif pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan literasi dan kearsipan;
3. Adanya regulasi yang berkaitan dengan Perpustakaan maupun Kearsipan
4. Adanya pembinaan dari ANRI dan Perpunas RI dalam rangka pengembangan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kerjasama dan membangun komitmen dengan pihak luar antara lain Perpustnas, ANRI, DPAD DIY, Perangkat Daerah, Kalurahan, Institusi Pendidikan, Lembaga Pemerintah, Pemangku Kepentingan, Pegiat Literasi, Kelompok Masyarakat, perusahaan, dll;
2. Meningkatkan penerapan pengelolaan perpustakaan dan pengelolaan arsip sesuai aturan (regulasi/pedoman) yang ada;
3. Meningkatkan pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, dasar perencanaan kedepan untuk dapat memperbaiki pelaksanaan di tahun berikutnya.

LAMPIRAN

Rencana Strategis
Pemerintah Kabupaten Bantul
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2022-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target per Tahun					
					2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	Terwujudnya pemerataan dan daya saing Pendidikan	Meningkatnya jumlah kunjungan pemustaka	Persentase pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	persen	33	33,5	34	34,5	35	35
			Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	angka	85	85,5	86	86,5	87	87
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Standar	Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	persen	74	79	85	90	95	95



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Wibawa Karyasatya

Kantor 1 : Jalan Jendral Sudirman No. 1 Bantul
Kantor 2 : Komplek Perkantoran Terpadu Pemda Bantul, Manding, Trirenggo Bantul
Kode Pos 55714 Telepon (0274) 368302
Posel: dpk@bantulkab.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Metadata	Penanggung jawab
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Kersipan Sesuai Standar	Cakupan OPD yang Mempunyai Tata Kelola Kearsipan dengan Baik*	Formulasi Pengukuran: Jumlah OPD yang telah melaksanakan tata kelola kearsipan dengan nilai baik dibagi jumlah OPD kali 100% Tipe Perhitungan: Normal Satuan: Persen	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Pemustaka	Persentase Pemustaka yang Berkunjung ke Perpustakaan*	Formulasi Pengukuran : Jumlah Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan dibagi jumlah penduduk kali 100% Tipe Perhitungan: Normal Satuan : Persen	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan*	Formulasi Pengukuran: Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Tipe Perhitungan: Normal Satuan : Angka	



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

3	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)**	Formulasi Pengukuran : Nilai IPLM didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) $IPLM \text{ Kab/Kota} = \frac{\sum_{i=1}^7 (UPLM)_i}{7} \times 100$ Tipe Perhitungan: Normal Satuan : Angka	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
---	---	--	---	---

Keterangan:

* Merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam Dokumen Renstra Perubahan Tahun 2021-2026

** IPLM merupakan Indikator Kinerja Tambahan sebagai tindak lanjut hasil Evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN & RB Tahun 2022

Bantul, 15 Januari 2025
 Kepala,



Drs. SUKRISNA DWI SUSANTA, M.Si
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 196802161993031003



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Wibawa Nya Bantul

Kantor 1 : Jalan Jendral Sudirman No. 1 Bantul
Kantor 2 : Komplek Perkantoran Terpadu Pemda Bantul, Manding, Tlirenggo Bantul
Kode Pos 55714 Telepon (0274) 368302
Posel: dpk@bantulkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUKRISNA DWI SUSANTA, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN



Drs. SUKRISNA DWI SUSANTA, M.Si.
NIP 196802161993031003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN 1
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jabatan : Kepala Dinas
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya jumlah kunjungan Pemustaka	Persentase Pemustaka yang Berkunjung ke Perpustakaan	Persentase	183	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	183*)
		Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	Angka	90,07	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	90,07*)
2.	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar	Cakupan PD yang Mempunyai Tata Kelola Kearsipan dengan Baik	Persentase	100	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	100*)
3	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (Indikator Kinerja Tambahan)	Angka	82,70	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	82,70*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.548.207.453,00
2.	a. Program Pembinaan Perpustakaan (DAK)	Rp 809.955.000,00
	b. Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 946.187.184,00
3.	Program Pengelolaan Arsip	Rp 357.863.544,00



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

4.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp 5.324.800,00
	Jumlah	Rp 8.667.537.981,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN



Drs. SUKRISNA DWI SUSANTA, M.Si.
NIP. 196802161993031003

LAMPIRAN II

PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2025

Uraian Sasaran 1 :

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja meningkatnya jumlah kunjungan Pemustaka adalah semakin banyaknya orang/masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber informasi, tempat belajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Undang -undang ini menjadikan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	Jumlah kunjungan pemustaka ke perpustakaan menjadi salah satu tolok ukur ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat.	Jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan dibagi jumlah penduduk kali 100%	Data pengunjung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul
2	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Pelayanan perpustakaan merupakan salah satu layanan publik yang menyediakan bahan pustaka, informasi serta keragaman jenis layanan perpustakaan lainnya. Responden survei adalah Pemustaka	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Laporan SKM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	183%	Indikator ini sesuai dengan Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Target ini menyesuaikan dengan capaian/realisasi pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 tercapai 145,91% (jumlah pengunjung: 1.412.776), pada tahun 2024 tercapai 182,3% (jumlah pengunjung: 1.787.138) Target tahun 2025 sudah meningkat dari realisasi tahun 2024. Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan pada tanggal 2 januari 2025 dalam acara Kick Off Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala Saba.
Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	90,07	Indikator ini sesuai dengan Perubahan Renstra Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Target ini menyesuaikan dengan capaian/realisasi pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 terealisasi nilai 91,74 dan pada tahun 2024 terealisasi nilai 90,06. Target tahun 2025 sudah meningkat dari realisasi tahun 2024 Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan pada tanggal 2 januari 2025 dalam acara Kick Off Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala Saba.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Uraian Sasaran 2 :

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar adalah semakin meningkatnya keseluruhan kegiatan yang meliputi kebijakan, pengelolaan arsip, dan pembinaan kearsipan dalam suatu sistem kearsipan daerah, yang didukung oleh SDM, prasarana dan sarana serta sumber daya lainnya. Salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur peningkatan penyelenggaraan kearsipan adalah banyaknya Perangkat Daerah yang telah melaksanakan tata kelola kearsipan dengan baik dan sesuai aturan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Undang -undang ini menjadikan arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh negara;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar	Peningkatan jumlah Perangkat Daerah yang telah melakukan tata kelola kearsipan dengan baik merupakan salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan kearsipan sesuai standar. Perangkat Daerah telah melaksanakan tata kelola kearsipan dengan baik ditunjukkan dari hasil nilai pengawasan kearsipan internal minimal kategori baik.	Jumlah PD yang telah melaksanakan tata kelola kearsipan dengan nilai baik dibagi jumlah PD kali 100%	Hasil Pengawasan Internal Dispusip



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Cakupan PD yang Mempunyai Tata Kelola Kearsipan dengan Baik	100%	Indikator ini sesuai dengan Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Target ini menyesuaikan dengan capaian/realisasi pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 tercapai 80% (36 PD dari 45 PD), pada tahun 2024 tercapai 100% (45 PD) Target tahun 2025 akan dipertahankan tetap 100% (45 PD) dengan nilai baik. Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan pada tanggal 2 Januari 2025 dalam acara Kick Off Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala Saba.

Uraian Sasaran 3 :

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur tingkat literasi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. IPLM merupakan kegiatan sensus/pendataan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan. Karakteristik IPLM lebih memfokuskan pada pengembangan dan penguatan kelembagaan dan infrastruktur perpustakaan. IPLM dihitung berdasarkan unsur-unsur pembangun masyarakat (UPLM), yaitu pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP, tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan anggota perpustakaan

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Undang-undang ini menjadikan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

LAMPIRAN 1
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun Anggaran : 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tujuan: Meningkatkan literasi masyarakat dan tata kelola arsip	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	82,70	I	-
					II	-
					III	-
					IV	82,70*)
		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	86,40	I	-
					II	-
					III	-
					IV	86,40
1.1	Sasaran: Meningkatnya budaya gemar membaca	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	81,14	I	-
					II	-
					III	-
					IV	81,14
1.2	Sasaran: Meningkatnya kinerja pengelolaan arsip	Indeks Pengawasan Arsip Internal	Indeks	80,83	I	-
					II	-
					III	-
					IV	80,83

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.784.920.426,00
2.	a. Program Pembinaan Perpustakaan (DAK)	Rp 809.955.000,00
	b. Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 1.135.746.788,00
3.	Program Pengelolaan Arsip	Rp 457.592.244,00
4.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp 5.324.800,00
	Jumlah	Rp 8.193.539.258,00



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 30 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN



DIAN MUTIARA SRI RAHMAWATI, SH, MM.
NIP. 196911121996032003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN II

PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2025

Uraian Sasaran 1 :

Sasaran kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul pada urusan perpustakaan adalah meningkatnya budaya gemar membaca. Dari sasaran ini diharapkan akan semakin banyak anggota masyarakat yang memiliki kebiasaan, minat dan kesadaran untuk menjadikan membaca sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Undang -undang ini menjadikan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Tingkat kegemaran membaca masyarakat sangat penting karena berhubungan langsung dengan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan bangsa. Kegemaran membaca masyarakat ini akan mendukung terciptanya masyarakat yang kritis, kreatif, inovatif, produktif dan berdaya saing	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat Dimensi TGM: FM = Frekuensi Membaca DM = Durasi Membaca JBB = (Jumlah Bahan Bacaan/Jumlah Buku dibaca	Hasil Kajian TGM dari Perpustakaan RI



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

			FAI=Frekuensi Akses Internet DAI=Durasi Akses Internet	
--	--	--	---	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	81,14	Indikator ini sesuai dengan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Target ini menyesuaikan dengan capaian/realisasi pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 tercapai nilai 80,89, target tahun 2025 sebesar 81,14. Target tahun 2025 sudah meningkat dari realisasi tahun 2024.



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Uraian Sasaran 2 :

Sasaran kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul pada urusan kearsipan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan arsip. Dengan sasaran kinerja ini diharapkan keseluruhan kegiatan dalam proses pengelolaan arsip dapat meningkat dan sesuai dengan aturan yang ada.. Adapun unsur utama dalam pengelolaan arsip antara lain penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan arsip, penyusutan arsip penyelamatan arsip statis, SDM, serta sarana prasarana kearsipan.. Salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur peningkatan kinerja pengelolaan arsip adalah indeks Pengawasan Arsip Internal.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Undang -undang ini menjadikan arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh negara;
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Pengawasan Arsip Internal	Pengawasan Arsip Internal dapat sebagai instrumen kontrol / alat untuk memastikan arsip dikelola sesuai standar dan peraturan yang ada. Hasil pengawasan arsip internal sebagai bahan rekomendasi untuk penyempurnaan sistem pengelolaan arsip	Sesuai ketentuan dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan	Hasil Pengawasan Internal Dispusip



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Pengawasan Arsip Internal	80,83	Indikator ini sesuai dengan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Target ini menyesuaikan dengan capaian/realisasi pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 tercapai nilai 80,82, target pada tahun 2025 sebesar 80,83 Target tahun 2025 lebih tinggi dari realisasi tahun 2024



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

**LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024**

NOMOR LHE : 061/0470.C/Ev.SAKIP/2025
TANGGAL : 30 April 2025



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

**LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024**

I. PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum Evaluasi

- a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e) Keputusan Inspektur Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f) Keputusan Bupati Bantul 592 Tahun 2024 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025;
- g) Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.
- h) Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor T/700.1.2/00470/PKPT/2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2024.

1.2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

2

Bupati Bantul selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Bantul perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Tim Evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

1.3. Tujuan Evaluasi

- a) Tujuan umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
- b) Tujuan Khusus :
 1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
 5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi:

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
- b) Penilaian pengukuran kinerja;
- c) Penilaian pelaporan kinerja;
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

1.5. Metodologi Evaluasi

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi Mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- 1) Checklist Pengumpulan Data dan Informasi;
- 2) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana;



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- 3) Observasi;
- 4) Studi Dokumentasi.

1.6. Susunan Tim

No.	Jabatan Dalam Tim	:	Nama
1.	Pengendali Mutu/ Penanggung Jawab	:	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H
2.	Pembantu Penanggung Jawab	:	Lies Ratriana Nugrohowati, S.IP., M.Si.
3.	Pengendali Teknis	:	Kisti Endaryati, S.E.
4.	Ketua Tim	:	Afwan Kais Subkhi, S.Pt., M.M.
5.	Anggota	:	Vici Tri Anggorowati, S.E. Noviana Bakti Lestari, S.E.

1.7. Gambaran Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Data umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Alamat : Jalan Gajah Mada No. 1 Bantul, Kapanewon
 Bantul, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta
 55712
 Pimpinan Perangkat Daerah
 Nama : Drs. Sukrisna Dwi Susanta, M.Si
 NIP : 196802161993031003
 Jabatan : Kepala Dinas

1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati yaitu "Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima" dan "Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya isitimewa", Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak empat indikator.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, menunjukkan bahwa capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	85	100	117,65
2.	Persentase Pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	34%	182,31%	536,21%
3.	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	86	90,06	104,72
4.	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	73,33	82,60	112,64

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 217,8% termasuk dalam kategori sangat tinggi, sehingga sangat mempengaruhi pencapaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (2023) sebesar 190,84%, maka capaian tahun 2024 meningkat 26,96%.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/522.C/Ev.SAKIP/2024 tanggal 19 Maret 2023 perihal Laporan Hasil Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023, berupa:

Tabel 1
Rekomendasi dan Tindaklanjuti Evaluasi Tahun Sebelumnya

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul agar pada tahun berikutnya dokumen laporan kinerja menyajikan informasi mengenai efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah memberikan keterangan/analisis efisiensi Sumber Daya pada BAB IV Laporan Kinerja Tahun 2024

Sumber data : Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2024 (BAB 1 Huruf H)

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

2.1. Kondisi

2.1.1. Perencanaan Kinerja

Komponen perencanaan kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendapatkan nilai 24,60 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu keberadaan Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Mutu Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja dengan bobot 15%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	24.60	82.00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5.40	90.00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9.00	7.20	80.00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	12.00	80.00%



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan seluruh dokumen perencanaan kinerja berupa:
 - a. Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja, berupa:
 - (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - (3) Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bantul;
 - (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045.
 - c. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah, berupa :
 - (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - d. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek, berupa:
 - (1) Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 - (2) Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
 - e. Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja berupa Matrik Rencana Aksi;
 - f. Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja berupa DPA – SKPD.

- 2) Pada komponen Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja, Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul telah memenuhi kriteria yang ada, meliputi sebagai berikut:
- Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.
 - Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.
 - Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
 - Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
 - Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.
 - Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
 - Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
 - Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

Namun komponen Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja masih terdapat kelemahan, yaitu masih terdapat penetapan target kinerja pada IKU **Persentase Pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan** dan **Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan** yang kurang menantang, dimana target yang ditentukan belum mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya.

2.1.2. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 24,00 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja dengan bobot 15%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	24.00	80.00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	5.40	90.00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan	9.00	8.10	90.00%



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

	Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan			
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	10.50	70.00%

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja;
- 2) Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui Aplikasi e-SAKIP ROPK untuk setiap level/jenjang dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien, serta dalam Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 telah menyajikan tabel efisiensi dalam penggunaan sumber daya anggaran namun belum disandingkan dengan capaian kinerja IKU;
- 3) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
- 4) Namun demikian pada aspek pengukuran kinerja masih dijumpai kelemahan yaitu Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja, perkembangan tren nilai rapotan cenderung menurun. Kondisi ini dapat dilihat dari hasil nilai rapotan sebagai berikut :
 - Triwulan I : 90,60
 - Triwulan II : 89,88
 - Triwulan III : 94,51
 - Triwulan IV : 86,56

2.1.3. Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendapatkan nilai 12,30 dengan bobot penilaian sebesar 15%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 3%, Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 4,5%, dan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja dengan bobot 7,5%.



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	12.30	82.00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.70	90.00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan	4.50	3.60	80.00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	6.00	80.00%

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja;
2. Pelaporan Kinerja telah dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

2.1.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendapatkan nilai 20,00 dengan bobot penilaian sebesar 25%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 5%, Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 7,5%, dan Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 12,5%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	20.00	80.00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.00	80.00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	6.00	80.00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	12.50	10.00	80.00%



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang ada pada organisasi;
- 2) Telah dilakukan penilaian mandiri implementasi sistem akuntabilitas kinerja oleh perangkat daerah;
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

2.1.5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Dari kondisi tersebut diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi atas capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2024 mendapatkan skor 80,90 dengan predikat kinerja **A** dengan interpretasi **Memuaskan**.

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	%-tase
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	24.60	82.00%
1.a	Keberadaan	6.00	5.40	90.00%
1.b	Kualitas/Mutu	9.00	7.20	80.00%
1.c	Pemanfaatan	15.00	12.00	80.00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	24.00	80.00%
2.a	Keberadaan	6.00	5.40	90.00%
2.b	Kualitas/Mutu	9.00	8.10	90.00%
2.c	Pemanfaatan	15.00	10.50	70.00%
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	12.30	82.00%
3.a	Keberadaan	3.00	2.70	90.00%
3.b	Kualitas/Mutu	4.50	3.60	80.00%
3.c	Pemanfaatan	7.50	6.00	80.00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	20.00	80.00%
4.a	Keberadaan	5.00	4.00	80.00%
4.b	Kualitas/Mutu	7.50	6.00	80.00%
4.c	Pemanfaatan	12.50	10.00	80.00%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100.00	80.90	80.90%



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Penilaian tersebut, selaras dengan hasil penilaian mandiri (*self assesment*) yang dilakukan oleh perangkat daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terdapat pemahaman terkait implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada perangkat daerah.

2.2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah – langkah perbaikan sebagai berikut:

- 1) Meninjau kembali target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun yang akan mendatang dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya;
- 2) Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah dengan upaya optimalisasi fungsi monev didukung rencana aksi secara nyata dalam rangka pencapaian kinerja;

3. PENUTUP

3.1. Simpulan

Nilai hasil evaluasi sebagaimana ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul memperoleh nilai 80,90. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

3.2. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul diharapkan dapat mendorong pencapaian output organisasi secara lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada perangkat daerah secara konsisten dan berkesinambungan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2024, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah Ditandatangani Secara Elektronik
Tanggal 14 Mei 2025
Nomor T/700.1.2.1/00839

INSPEKTUR BANTUL,



Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197112301996031002



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦠꦤꦶꦭ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR: T/700.1.2/00470/PKPT/2025

Dasar:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 592 Tahun 2024 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025; dan
- Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	2 HP
2.	Lies Ratriana Nugrohowati, S.IP., M.Si.	Pembantu Penanggung Jawab	6 HP
3.	Kisti Endaryati, S.E.	Pengendali Teknis	14 HP
4.	Afwan Kais Subkhi, S.Pt., M.M.	Ketua Tim	14 HP
5.	Vici Tri Anggorowati, S.E.	Anggota	14 HP
6.	Noviana Bakti Lestari, S.E.	Anggota	14 HP

- Untuk : Melaksanakan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 pada :
- Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - Dinas Pariwisata;
- Tujuan : 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP
- Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024.
- Ruang Lingkup : 1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan..
- Tanggal : 10 s.d. 27 Maret 2025.

Biaya yang berkaitan dengan pengawasan ini dibiayai APBD Tahun 2025 dan kepada APIP tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Maret 2025

Plt. Inspektur,



HERMAWAN SETIAJI, S IP, MH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197403221993111001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Wibawa Karyasatya

Kantor 1 : Jalan Jendral Sudirman No. 1 Bantul
Kantor 2 : Komplek Perkantoran Terpadu Pemda Bantul, Manding, Trirenggo, Bantul
Kode Pos 55714 Telepon (0274) 368302
Posel: dpk@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 37/Tahun 2025

T E N T A N G

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2024 DIEVALUASI TAHUN 2025

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui sejauh mana komitmen dalam melaksanakan tindak lanjut rekomendasi AKIP dan untuk terus melakukan perbaikan dalam implementasi SAKIP secara berkelanjutan, perlu ditetapkan tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024;
- b. Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 061/0470.C/Ev.SAKIP/2025 tanggal 30 April 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL TENTANG TINDAKLANJUT HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 DIEVALUASI TAHUN 2025

KESATU : Menyusun Laporan tindaklanjut Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 dievaluasi Tahun 2025, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul ini.;

KEDUA : Laporan tindaklanjut Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2024 dievaluasi Tahun 2025, merupakan laporan kepada Bupati dan merupakan salah satu bukti dukung dalam implementasi AKIP.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 25 Juli 2025
Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Bantul



Drs. Sukrisna Dwi Susanta, M.Si.
NIP. 196802161993031003

**LAMPIRAN KEPUTUSAN DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 37 TAHUN 2025
TENTANG TINDAKLANJUT HASIL
EVALUASI IMPLEMENTASI AKIP DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN
2024 DIEVALUASI TAHUN 2025**

TINDAKLANJUT HASIL EVALUSI AKIP TAHUN 2024 DIEVALUASI TAHUN 2025

1. Rekomendasi:
 - a. Meninjau kembali target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun yang akan datang dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya.
 - b. Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah dengan upaya optimalisasi fungsi monev didukung rencana aksi secara nyata dalam rangka pencapaian kinerja.
2. Tindaklanjut Rekomendasi:
 - a. Telah dilakukan peninjauan kembali target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul pada Tahun 2025. IKU yang telah disesuaikan ini tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - b. Telah dilakukan monitoring rencana aksi pada tahun 2025
3. Bukti Dukung sebagai berikut:

- a. Peninjauan kembali target IKU-Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Wibawa Nya Bantul Berkarya

Kantor 1 : Jalan Jendral Sudirman No. 1 Bantul
Kantor 2 : Komplek Perkantoran Terpadu Pemda Bantul, Manding, Trirenggo Bantul
Kode Pos 55714 Telepon (0274) 368302
Posel: dpk@bantulkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUKRISNA DWI SUSANTA, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN



Drs. SUKRISNA DWI SUSANTA, M.Si.
NIP 196802161993031003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

LAMPIRAN 1
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jabatan : Kepala Dinas
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya jumlah kunjungan Pemustaka	Persentase Pemustaka yang Berkunjung ke Perpustakaan	Persentase	183	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	183*)
		Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	Angka	90,07	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	90,07*)
2.	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar	Cakupan PD yang Mempunyai Tata Kelola Kearsipan dengan Baik	Persentase	100	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	100*)
3	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (Indikator Kinerja Tambahan)	Angka	82,70	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	82,70*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.548.207.453,00
2.	a. Program Pembinaan Perpustakaan (DAK)	Rp 809.955.000,00
	b. Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 946.187.184,00
3.	Program Pengelolaan Arsip	Rp 357.863.544,00



Balai Sertifikasi Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

4.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp 5.324.800,00
	Jumlah	Rp 8.667.537.981,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN



Drs. SUKRISNA DWI SUSANTA, M.Si.
NIP. 196802161993031003



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN II

PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2025

Uraian Sasaran 1 :

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja meningkatnya jumlah kunjungan Pemustaka adalah semakin banyaknya orang/masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber informasi, tempat belajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Undang -undang ini menjadikan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	Jumlah kunjungan pemustaka ke perpustakaan menjadi salah satu tolok ukur ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat.	Jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan dibagi jumlah penduduk kali 100%	Data pengunjung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul
2	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Pelayanan perpustakaan merupakan salah satu layanan publik yang menyediakan bahan pustaka, informasi serta keragaman jenis layanan perpustakaan lainnya. Responden survei adalah Pemustaka	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Laporan SKM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	183%	Indikator ini sesuai dengan Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Target ini menyesuaikan dengan capaian/realisasi pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 tercapai 145,91% (jumlah pengunjung: 1.412.776), pada tahun 2024 tercapai 182,3% (jumlah pengunjung: 1.787.138) Target tahun 2025 sudah meningkat dari realisasi tahun 2024. Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan pada tanggal 2 januari 2025 dalam acara Kick Off Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala Saba.
Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	90,07	Indikator ini sesuai dengan Perubahan Renstra Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Target ini menyesuaikan dengan capaian/realisasi pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 terealisasi nilai 91,74 dan pada tahun 2024 terealisasi nilai 90,06. Target tahun 2025 sudah meningkat dari realisasi tahun 2024 Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan pada tanggal 2 januari 2025 dalam acara Kick Off Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala Saba.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

Uraian Sasaran 2 :

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar adalah semakin meningkatnya keseluruhan kegiatan yang meliputi kebijakan, pengelolaan arsip, dan pembinaan kearsipan dalam suatu sistem kearsipan daerah, yang didukung oleh SDM, prasarana dan sarana serta sumber daya lainnya. Salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur peningkatan penyelenggaraan kearsipan adalah banyaknya Perangkat Daerah yang telah melaksanakan tata kelola kearsipan dengan baik dan sesuai aturan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Undang -undang ini menjadikan arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh negara;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar	Peningkatan jumlah Perangkat Daerah yang telah melakukan tata kelola kearsipan dengan baik merupakan salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan kearsipan sesuai standar. Perangkat Daerah telah melaksanakan tata kelola kearsipan dengan baik ditunjukkan dari hasil nilai pengawasan kearsipan internal minimal kategori baik.	Jumlah PD yang telah melaksanakan tata kelola kearsipan dengan nilai baik dibagi jumlah PD kali 100%	Hasil Pengawasan Internal Dispusip



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Cakupan PD yang Mempunyai Tata Kelola Kearsipan dengan Baik	100%	Indikator ini sesuai dengan Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Target ini menyesuaikan dengan capaian/realisasi pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 tercapai 80% (36 PD dari 45 PD), pada tahun 2024 tercapai 100% (45 PD) Target tahun 2025 akan dipertahankan tetap 100% (45 PD) dengan nilai baik. Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan pada tanggal 2 Januari 2025 dalam acara Kick Off Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala Saba.

Uraian Sasaran 3 :

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur tingkat literasi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. IPLM merupakan kegiatan sensus/pendataan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan. Karakteristik IPLM lebih memfokuskan pada pengembangan dan penguatan kelembagaan dan infrastruktur perpustakaan. IPLM dihitung berdasarkan unsur-unsur pembangun masyarakat (UPLM), yaitu pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP, tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan anggota perpustakaan

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Undang-undang ini menjadikan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	IPLM merupakan kegiatan sensus/pendataan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan IPLM lebih memfokuskan pada pengembangan dan penguatan kelembagaan dan infrastruktur perpustakaan	Rumus IPLM merupakan kumpulan dari rumus pengukuran 7 komponen unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) beserta pembaginya yaitu komponen masyarakat (AM) $IPLM \text{ Kab/Kota} = \frac{\sum_{i=1}^7 (UPLM)_i}{7} \times 100$	Hasil Kajian IPLM dari Perpustakaan RI

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	82,70	Indikator ini merupakan indikator kinerja tambahan atas hasil Evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN dan RB Tahun 2022 Target ini menyesuaikan dengan capaian/realisasi pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 tercapai 68,60 , pada tahun 2024 terealisasi 82,60. Target tahun 2025 sudah meningkat dari realisasi tahun 2024. Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan pada tanggal 2 januari 2025 dalam acara Kick Off Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala Saba.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

b. Monitoring Rencana Aksi tahun 2025

MONITORING RENCANA AKSI PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL SEMESTER 1 (JANUARI S/D JUNI) TAHUN 2025

Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Rencana Aksi	Semester 1 (Januari-Juni 2025)										Catatan Hasil Monitoring	Tindak lanjut
					Fisk			Keuangan								
		Target Kinerja	Anggaran		Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
Meningkatnya jumlah kunjungan pemustaka	Persentase pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	183 persen	8.255.306.461		55,64	51,94	3,70	5.727.567.909,00	69,38	3.393.738.553	41,11	28,27				
	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan perpustakaan	90,07 angka														
Meningkatnya Index Pembangunan Literasi Masyarakat	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat <i>(Indikator kinerja tambahan)</i>	82,7 angka														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NILAI AKIP	80 ANGKA	6.541.407.338		50,41	50,17	0,24	4.683.892.215	71,60	2.730.212.157,00	41,74	29,87				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	3.000.000		80	80	0	1.500.000	50,00	1.485.000,00	49,50	0,50				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	1.500.000	Melakukan rapat, pengumpulan data pendukung, dan evaluasi realisasi pada tahun sebelumnya	60,00	60,00	0,00	-		-	-	-	Draft dokumen perencanaan telah disusun sesuai jadwal yang telah ditentukan (masih dalam proses penyusunan dokumen)	Dilakukan perbaikan dan penyempurnaan draft dokumen perencanaan		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	1.500.000	Melakukan rapat, pengumpulan data pendukung, evaluasi laporan kinerja tahun sebelumnya	100,00	100,00	0,00	1.500.000	100,00	1.485.000,00	99,00	1,00	Dokumen evaluasi telah disusun sesuai jadwal	Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan berikutnya		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 persen	5.945.904.870		50,04	50	0	4.367.659.981	73,46	2.453.389.169,00	41,26	32,20				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28 orang/bulan	5.838.532.434	Menyajikan pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta menyelesaikan laporan tepat waktu	50,04	50,04	0,00	4.313.973.763	73,89	2.406.882.963	41,22	32,67	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN telah dilaksanakan sesuai rencana	Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan berikutnya		

Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Rencana Aksi	Semester 1 (Januari-Juni 2025)										Catatan Hasil Monitoring	Tindak lanjut
					Fisik			Keuangan								
		Target Kinerja	Anggaran		Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	77.760.000	Menyiapkan pembayaran honorarium penatusahan keuangan dan menyelesaikan laporan tepat waktu	50,04	50,04	0,00	38.880.000	50,00	31.680.000,00	40,74	9,26	Pembayaran honorarium penatatusahan keuangan telah dilakasanakan sesuai rencana Realisasi keuangan belum maksimal karena adanya kekosongan	Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan berikutnya		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	19 laporan	29.612.436	Melakukan penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran tepat waktu	50,04	50,04	0,00	14.806.218	50,00	14.806.206,00	50,00	0,00	Laporan keuangan telah disusun sesuai jadwal dan perencanaan	Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan berikutnya		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	100 persen	141.286.510		63	52	11,19	88.122.720	62,37	71.067.600,00	50,30	12,07				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	5.491.140	Melakukan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan sesuai prioritas kebutuhan dan membuat SPJ tepat waktu	59,69	59,69	0,00	3.277.290	59,68	3.262.000,00	59,40	0,28	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan telah sesuai rencana	Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan berikutnya		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	35.192.250	Melakukan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai prioritas kebutuhan	78,27	78,27	0,00	27.542.250	78,26	27.179.300,00	77,23	1,03	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor telah sesuai dengan rencana	Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan berikutnya		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	9.999.520	Melakukan penyediaan peralatan rumah tangga (alat kebersihan dan bahan pembersih) dan membuat SPJ tepat waktu	67,59	67,59	0,00	6.758.680	67,59	6.756.400,00	67,57	0,02	Penyediaan peralatan rumah tangga sudah sesuai rencana	Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan berikutnya		

Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Rencana Aksi	Semester 1 (Januari-Juni 2025)										Catatan Hasil Monitoring	Tindak lanjut
					Fisik			Keuangan								
		Target Kinerja	Anggaran		Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	13.237.600	Melakukan pembayaran barang cetak dan penggandaan dan menyusun SPJ tepat waktu	62,82	62,82	0,00	8.003.500	60,46	6.679.000,00	50,45	10,01	Pembayaran barang cetak dan penggandaan telah sesuai rencana Untuk realisasi keuangan ada yang belum terealisasi	Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan berikutnya		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 dokumen	3.900.000	Melakukan pembayaran langganan surat kabar dan majalah dan membuat SPJ	57,54	57,54	0,00	1.950.000	50,00	1.740.000,00	44,62	5,38	Pembayaran langganan majalah dan surat kabar telah sesuai rencana Realisasi keuangan belum maksimal karena realisasi pembayaran menyesuaikan dengan harga dan tagihan	Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan berikutnya		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	45 laporan	42.816.000	Melaksanakan rapat koordinasi dan perjalanan dinas serta membuat SPJ tepat waktu	59,77	59,77	0,00	25.591.000	59,77	25.450.900,00	59,44	0,33	Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi (perjalanan dinas) telah dilaksanakan sesuai rencana	Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan berikutnya		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	30.650.000	Melaksanakan pemeliharaan aplikasi layanan perpustakaan	51,60	0,00	51,60	15.000.000	48,94	-	-	48,94	Pemeliharaan aplikasi layanan perpustakaan mundur pelaksanaannya karena menunggu kebijakan efisiensi anggaran	Akan dilakukan percepatan pemeliharaan aplikasi layanan perpustakaan		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	296.459.488		53	53	0	153.339.744	51,72	134.589.188,00	45,40	6,32				

Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Rencana Aksi	Semester 1 (Januari-Juni 2025)										Catatan Hasil Monitoring	Tindak lanjut
					Fisik			Keuangan								
		Target Kinerja	Anggaran		Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	39.700.000	Melakukan pembayaran langganan telepon dan internet	46,86	46,86	0	18.600.000	46,85	11.391.058,00	28,69	18,16	Pembayaran langganan telepon dan internet telah dilaksanakan sesuai rencana Realisasi keuangan belum maksimal karena menyesuaikan realisasi tagihan	Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan berikutnya		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	19.860.000	Melakukan service dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai prioritas kebutuhan dan menyusun SPI tepat waktu	82,02	82,02	0	16.290.000	82,02	16.130.000,00	81,22	0,80	Pelaksanaan service n pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor telah dilaksanakan sesuai rencana	Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan berikutnya		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3 laporan	236.899.488	Melakukan pembayaran honor tenaga non ASN (Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan dan Tenaga Keamanan) serta membuat SPI tepat waktu	51,54	51,54	0	118.449.744	50,00	107.068.130,00	45,20	4,80	Pembayaran honor non ASN telah dilaksanakan sesuai rencana	Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan berikutnya		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	154.756.470		47,40	47,40	0	73.269.770	47,35	69.701.200,00	45,04	2,31				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	16 unit	49.180.250	Melakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan roda empat dan roda dua sesuai prioritas kebutuhan dan membuat SPI tepat waktu	41,07	41,07	0	20.200.000	41,07	19.020.000,00	38,67	2,40	Pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan telah dilaksanakan sesuai rencana	Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan berikutnya		

Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Rencana Aksi	Semester 1 (Januari-Juni 2025)										Catatan Hasil Monitoring	Tindak lanjut
					Fisik			Keuangan								
		Target Kinerja	Anggaran		Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi(%)	Deviasi				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 unit	84.407.350	Melakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas operasional roda empat sesuai prioritas kebutuhan dan membuat SPI tepat waktu	40,54	40,54	0	34.129.900	40,43	31.781.900,00	37,65	2,78	Pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas operasional telah dilaksanakan sesuai rencana	Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan berikutnya		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	21.168.870	Melakukan pemeliharaan dan rehabilitasi gedung Arsip dan gedung perpustakaan sesuai prioritas kebutuhan dan membuat SPI tepat waktu	89,47	89,47	0	18.939.870	89,47	18.899.300,00	89,28	0,19	Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung telah dilaksanakan sesuai jadwal	Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan berikutnya		
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG TERAKREDITASI	17,48 PERSEN	1.713.899.123		60,87	53,71	7,16	1.043.675.694	60,89	663.526.396,00	38,71	22,18				
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pembinaan perpustakaan	53 perpustakaan	1.024.435.523		46,72	45,47	1,25	478.456.094	46,70	375.079.396,00	36,61	10,09				
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya	5 perpustakaan	62.357.500	Melakukan rapat koordinasi, pembagian jadwal kegiatan dan pembagian personil untuk kegiatan pembinaan perpustakaan dan talkshow literasi	100,00	95,00	5	62.357.500	100,00	50.462.500,00	80,92	19,08	Realisasi kinerja fisik dan keuangan belum maksimal karena ada kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan pelaksanaan mundur dari jadwal semula dan ada kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan	Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan berikutnya		

Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Rencana Aksi	Semester 1 (Januari-Juni 2025)										Catatan Hasil Monitoring	Tindak lanjut
					Fisik			Keuangan								
		Target Kinerja	Anggaran		Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	5 layanan	747.373.375	Melakukan koordinasi, pembagian jadwal dan personil untuk kegiatan layanan perpustakaan	35,60	35,60	0	265.982.904	35,59	208.485.572,00	27,90	7,69	Realisasi fisik dan keuangan belum maksimal karena adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal semula	Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan berikutnya		
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah data dan informasi perpustakaan	1 dokumen	32.468.600	Melakukan koordinasi, pembagian jadwal dan personil untuk kegiatan identifikasi naskah kuno dan pendataan perpustakaan	100,00	70,00	30	32.468.600	100,00	4.886.200,00	15,05	84,95	Kinerja fisik dan keuangan belum maksimal karena kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan berikutnya		
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	675 eksemplar	182.236.048	Melakukan koordinasi untuk pengalihan buku dan pengadaan buku perpustakaan serta pembayaran honor non ASN Tenaga Perpustakaan	64,61	64,61	0	117.647.090	64,56	111.245.124,00	61,04	3,52	Pelaksanaan kegiatan telah sesuai jadwal dan rencana	Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan berikutnya		
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pernyataan gemar membaca di masyarakat	1 laporan	689.463.600		81,90	65,96	15,94	565.219.600	81,98	288.447.000,00	41,84	40,14				
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	2 perpustakaan	161.312.800	Melakukan koordinasi dan pembagian personil untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial	78,31	20,00	58,31	126.312.800	78,30	30.000.000,00	18,60	59,70	Realisasi fisik dan keuangan belum maksimal karena adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal semula	Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan berikutnya		
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan masyarakat	12 lokus	528.150.800	Melakukan koordinasi, pembagian jadwal dan personil untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi budaya baca dan literasi	83,00	80,00	3	438.906.800	83,10	258.447.000,00	48,89	34,17	Realisasi fisik dan keuangan belum maksimal karena adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal semula	Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan berikutnya		

Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Rencana Aksi	Semester 1 (Januari-Juni 2025)										Catatan Hasil Monitoring	Tindak lanjut
					Fisik			Keuangan								
		Target Kinerja	Anggaran		Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi(%)	Deviasi				
Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar	Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	100 persen	342.915.244		42,57	42,57	0	145.469.204	42,27	133.394.810,00	38,75	3,52				
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS KINERJA, ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL	63 PERSEN	337.590.444		42,57	42,57	0	142.694.404	42,27	130.822.510,00	38,75	3,52				
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif	90 persen	324.965.344		41,41	41,41	0	133.931.804	41,29	122.782.410,00	37,85	3,44				
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	100.000 berkas	164.475.600	Melakukan rapat koordinasi, pembagian jadwal dan personil untuk melaksanakan pendataan naskah dinas, dan pelatihan pengelolaan arsip untuk kalurahan dan masyarakat	37,88	37,88	0	62.309.932	37,88	52.429.100,00	31,88	6,00	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai jadwal	Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan berikutnya		
													Realisasi keuangan belum maksimal karena masih dalam proses SPI			
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	2.000 berkas	124.824.744	Melakukan rapat koordinasi, dan melakukan pendataan serta pemindahan arsip	50,02	50,02	0	62.199.872	49,83	61.293.310,00	49,10	0,73	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai jadwal dan rencana	Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan berikutnya		
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	45 laporan	35.065.000	Melakukan rapat koordinasi dan persiapan pengawasan kearsipan internal maupun eksternal	27,34	27,34	0	9.422.000	26,87	9.060.000,00	25,84	1,03	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai jadwal dan rencana	Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan berikutnya		
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	90 persen	13.225.100		71,00	71,00	0	8.762.600	66,26	8.040.100,00	60,79	5,47				

Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Rencana Aksi	Semester 1 (Januari-Juni 2025)										Catatan Hasil Monitoring	Tindak lanjut
					Fisik			Keuangan								
		Target Kinerja	Anggaran		Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	100 persen	5,324,800		53.00	53.00	0	2,774,800	52.11	2,562,300.00	48.12	3.99				
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	2,000 arsip	5,324,800	Melakukan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah tentang penilaian dan pemusnahan arsip yang diajukan PD	53.00	53.00	0	2,774,800	52.11	2,562,300.00	48.12	3.99	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai jadwal dan rencana	Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan berikutnya		
	JUMLAH		8,558,221,705					5,873,037,113.00	68.31	3,527,123,363.00	41.02					



 30 Juli 2025
 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Kabupaten Dairi
 Dr. SUKRIANA DWI SUSANTA, M.Si.
 NIP. 198302361993031003